

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

DPUTR
TAHUN 2024



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KAB. CIREBON

Jl. P. Cakrabuana No.100 TALUN

Kata Pengantar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa setiap Instansi dalam setiap akhir anggaran harus menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah, baik dalam hal keberhasilan maupun juga kegagalan dalam pelaksanaan Program Kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi.

Dengan demikian, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian hasil kinerja organisasi dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, meliputi: penerimaan, pengalokasian, dan pelaksanaan serta pengamanannya.

Sebagai mata rantai dari rangkaian kegiatan manajemen, adanya evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan, selain menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas pada akhir tahun anggaran, juga menjadi bahan masukan bagi organisasi, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan tahun mendatang.

Akhirnya, mudah-mudahan Laporan ini sedikit banyak akan bermanfaat khususnya dalam upaya peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon.

Talun, Februari 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
Kabupaten Cirebon



Ir. IWAN RIZKI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660223 199303 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian Kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diberikan, berdasarkan kepada suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon telah melaksanakan fungsinya sebagai pembantu Kepala Daerah. Hal tersebut dapat mensukseskan visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Pada Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melaksanakan 6 sasaran yang termuat dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2024, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten
2. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air
3. Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang
4. Terciptanya pelayanan jasa kontruksi yang optimal
5. Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan
6. Meningkatnya Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung

Untuk mewujudkan capaian sasaran tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Pada Tahun Anggaran 2024 mengelola anggaran Belanja yang bersumber dari APBD Kabupaten dan Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp. 323.799.744.502,- dengan realisasi sebesar Rp. 314.900.775.997,- atau 97,25%. Dengan capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten”
 - Diukur dengan indikator Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap).
 - Capaian indikator dimaksud dukung oleh kinerja 2 (dua) Program. Yaitu Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dan Program Penyelenggaraan Jalan.
 - Target Indikator sasaran Tahun 2024 sebesar 87% dengan realisasi sebesar 84,91%, dengan demikian capaian ini belum memenuhi target. Persentase Capaian dihitung berdasarkan realisasi dibagi target dikalikan 100%, dengan capaian 97,60%.
2. Capaian Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA”
 - Diukur dengan indikator Meningkatnya persentase Intensitas Tanam.
 - Capaian indikator dimaksud dukung oleh kinerja 1 (satu) Program. Yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

- Target Indikator sasaran Tahun 2024 sebesar 86,67% dengan realisasi sebesar 91,33%, dengan demikian capaian ini melebihi target. Persentase Capaian dihitung berdasarkan realisasi dibagi target dikalikan 100%, dengan capaian 105,38%.
3. Capaian Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang”
- Diukur dengan indikator Ketaatan terhadap RTRW.
 - Capaian indikator dimaksud dukung oleh kinerja 2 (dua) Program. Yaitu Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 - Target Indikator sasaran Tahun 2024 sebesar 33,33% dengan realisasi sebesar 33,33%, dengan demikian capaian ini memenuhi target. Persentase Capaian dihitung berdasarkan realisasi dibagi target dikalikan 100%, dengan capaian 100%.
4. Capaian Sasaran Strategis 4 “Terciptanya pelayanan jasa kontruksi yang optimal”
- Diukur dengan indikator Persentase layanan informasi jasa kontruksi.
 - Capaian indikator dimaksud dukung oleh kinerja 1 (dua) Program. Yaitu Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
 - Target Indikator sasaran Tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, dengan demikian capaian ini memenuhi target. Persentase Capaian dihitung berdasarkan realisasi dibagi target dikalikan 100%, dengan capaian 100%.
5. Capaian Sasaran Strategis 5 “Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan”
- Diukur dengan indikator Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD.
 - Capaian indikator dimaksud dukung oleh kinerja 1 (dua) Program. Yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Target Indikator sasaran Tahun 2024 sebesar 75 Point dengan realisasi sebesar 74,50 Point, dengan demikian capaian ini memenuhi target. Persentase Capaian dihitung berdasarkan realisasi dibagi target dikalikan 100%, dengan capaian 99,33%.
6. Capaian Sasaran Strategis 5 “Meningkatnya Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung”
- Diukur dengan indikator Prosentase penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung.
 - Capaian indikator dimaksud dukung oleh kinerja 4 (dua) Program. Yaitu Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Rogram Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional,

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dan Program Penataan Bangunan Gedung.

- Target Indikator sasaran Tahun 2024 sebesar 64,01% dengan realisasi sebesar 47,30%, dengan demikian capaian ini belum memenuhi target. Persentase Capaian dihitung berdasarkan realisasi dibagi target dikalikan 100%, dengan capaian 73,89%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas terdapat tantangan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ke depan, sebagai berikut :

1. Pemenuhan Bangunan Penampungan Sampah seiring dengan kebutuhan tempat pengurai sampah.
2. Peningkatan kondisi jalan mantap dan mempertahankan kemantapan jalan.
3. Pemenuhan pembangunan dan pengembangan SPAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk.
4. Peningkatan kondisi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Sumber Daya Air untuk mendukung ketahanan pangan dan meminimalisir daerah rawan banjir.
5. Penyediaan bangunan instalasi pengolahan limbah terpadu dan sarana dalam pengolahan limbah domestik.
6. Pemenuhan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Cirebon.
7. Pemenuhan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat.
8. Pemenuhan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Talun, Februari 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang



Ir. IWAN RIZKI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660223 199303 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR FOTO	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Cascading Kinerja sebagai dasar pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	1
C. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	3
D. Isu Strategis	5
E. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana	5
F. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	8
G. Dasar Hukum	7
H. Sistematika Laporan Kinerja	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis	10
B. Struktur Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Tahun 2024	12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	19
D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	23
B. Pengukuran Pencapaian Kinerja	25
C. Efisiensi Anggaran dan Efektifitas Anggaran	61
D. Inovasi	64
BAB IV PENUTUP	65
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I.1	Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5
Tabel I.2	Sarana Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6
Tabel I.3	Anggaran Tahun 2024	7
Tabel I.4	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	8
Tabel II.1	Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang lima Tahun	10
Tabel II.2	Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang lima Tahun	11
Tabel II.3	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang lima Tahun	12
Tabel II.4	Struktur Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan terkait langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024	13
Tabel II.5	Matriks Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2024	19
Tabel III.1	Capaian Indikator Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2024	26
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Sasatan Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon	26
Tabel III.3	Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1	27
Tabel III.4	Target dan Realisasi Sasaran 1 Tahun 2024	27
Tabel III.5	Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2024	28
Tabel III.6	Capaian Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan terhadap Sasaran 1	28
Tabel III.7	Analisa faktor Pendorong,Penghambat dan Solusi Sasaran 1	32
Tabel III.8	Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2	32
Tabel III.9	Target dan Realisasi Sasaran 2	32
Tabel III.10	Rencana dan Realisasi Tanam 2023/2024	34
Tabel III.11	Capaian Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan terhadap Sasaran 2	38
Tabel III.12	Analisa faktor Pendorong,Penghambat dan Solusi Sasaran 2	41
Tabel III.13	Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3	41
Tabel III.14	Target dan Realisasi Sasaran 3	41
Tabel III.15	Capaian Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan terhadap Sasaran 3	42
Tabel III.16	Analisa faktor Pendorong,Penghambat dan Solusi Sasaran 3	45
Tabel III.17	Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan Sasaran 4	45
Tabel III.18	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 4	45
Tabel III.19	Capaian Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan terhadap Sasaran 4	46
Tabel III.20	Analisa faktor Pendorong,Penghambat dan Solusi Sasaran 4	47
Tabel III.21	Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan Sasaran 5	48
Tabel III.22	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 5	48
Tabel III.23	Capaian Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan terhadap Sasaran 5	49
Tabel III.24	Analisa faktor Pendorong,Penghambat dan Solusi Sasaran 5	52
Tabel III.25	Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan Sasaran 6	53
Tabel III.26	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 6	53

Tabel III.27	Capaian Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan terhadap Sasaran 6	53
Tabel III.28	Rekapitulasi SPAM	58
Tabel III.29	Cakupan akses air limbah domestik	44
Tabel III.30	Analisa faktor Pendorong, Penghambat dan Solusi Sasaran 6	46
Tabel III.31	Efisiensi dan Efektifitas per Sasaran	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I.1 Cascading Kinerja	2
Gambar I.2 Struktur Organisasi	3
Gambar II.1 Instrumen Pendukung 1	20
Gambar II.2 Instrumen Pendukung 2	21
Gambar II.3 Instrumen Pendukung 3	22
Gambar II.4 Instrumen Pendukung 4	22

DAFTAR FOTO

	Halaman
Foto III.1	Pembuatan Saluran Pada Ruas Jalan Kertasemaya - Gegesik 30
Foto III.2	Pembuatan Trotoar Pada Ruas Jalan Jatiseeng-Pabuaran 30
Foto III.3	Peningkatan Jalan Arjawinangun - Suranenggala 31
Foto III.4	Peningkatan Jembatan Cempaka- Karangsari 31
Foto III.5	Rehabilitasi Jembatan Gantung Pada Ruas Jalan Cihowe -Tonjong 31
Foto III.6	Pembangunan Senderan Sungai Sikenanga Kec. Plered 39
Foto III.7	Pemasangan Bronjong Kali Tersana Kec. Pabedilan 40
Foto III.8	Normalisasi Kali Sibanteng Kec. Jamblang 40
Foto III.9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ciwado 40
Foto III.10	Normalisasi Sal.sek Srombyong Kec.Kapetakan 40
Foto III.11	Fasilitasi Persetujuan Subtansi RTRW 41
Foto III.12	Fasilitasi Persetujuan Subtansi RDTR 44
Foto III.13	Pelatihan Tenaga Terampil 47
Foto III.14	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas 47
Foto III.15	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 48
Foto III.16	Forum OPD 51
Foto III.17	Rapat Evaluasi 52
Foto III.18	Rapat Persiapan Penyusunan Rencana Kerja 52
Foto III.19	Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) / Penambahan Sumur Dalam Terlindungi / Broncaptering di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu 57
Foto III.20	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) / Broncaptering / Sumur Dalam Terlindungi di Desa Cangkring Kecamatan Plered 57
Foto III.21	Perbaikan Jalan menuju TPAS Kubangdeleg 58
Foto III.22	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Pamengkang Kecamatan Mundu 59
Foto III.23	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Damarguna Kecamatan Giledug 60
Foto III.24	Layanan Bangunan Gedung 60

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

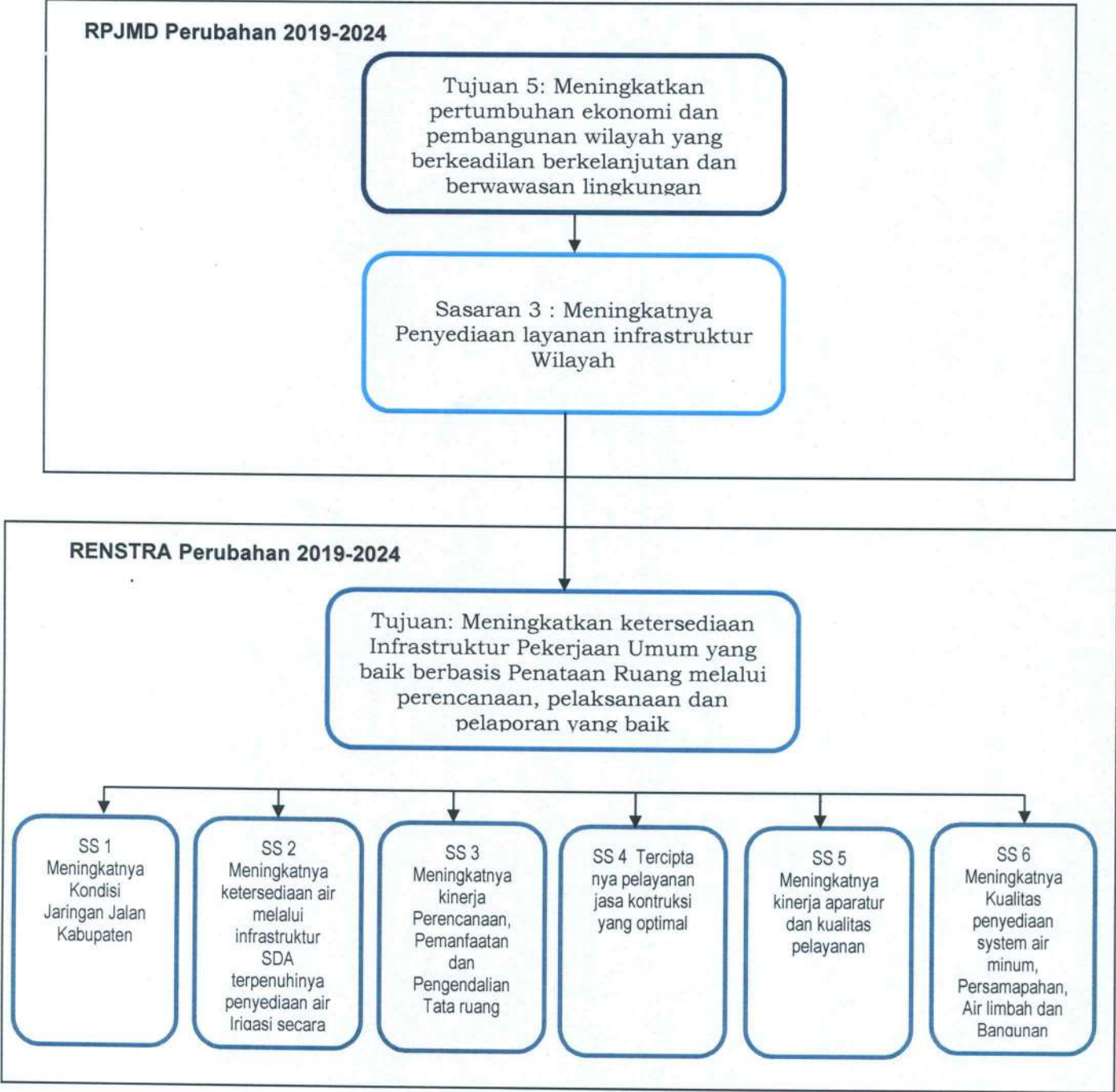
Laporan pertanggungjawaban berbentuk pengukuran kinerja merupakan salah satu hal penting dari hasil pelaksanaan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas dan mengetahui serta mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik.

B. Cascading kinerja sebagai dasar pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

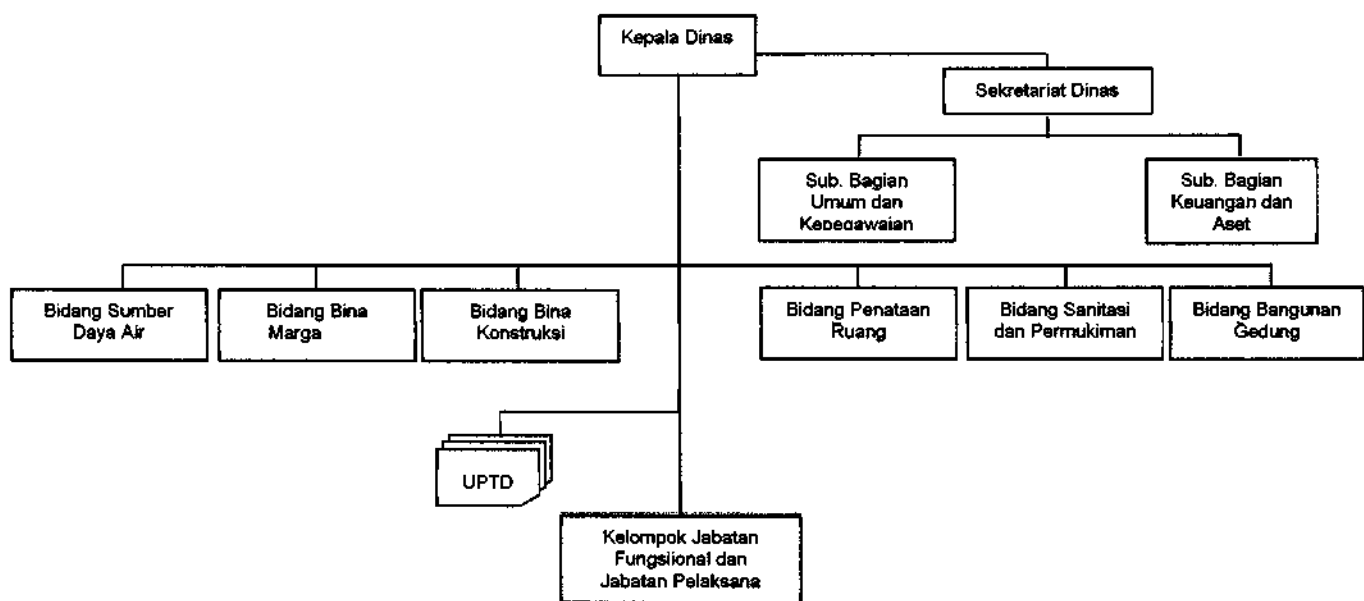
Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana di amanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon tahun 2019 – 2024. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dibentuk dengan skema Kinerja tergambarkan pada halaman berikutnya:

Gambar I.1 Cascading Kinerja



Sumber RPJMD Perubahan 2019-2024, Renstra Perubahan DPUTR 2019 - 2024

Gambar 1.2 Struktur Organisasi



Sumber : Lampiran Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon

C. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD Perubahan 2019-2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana berikut :

Gambar 1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 133 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 133), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

b. Pengelolaan Sumber Daya Air;

c. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;

d. Pengembangan sistem dan pengolahan persampahan regional;

e. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;

f. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;

g. Pengembangan infrastruktur permukiman;

h. Penataan bangunan gedung;

i. Penataan bangunan dan lingkungannya;

j. Penyelenggaraan infrastruktur jalan;

k. Pengembangan jasa konstruksi;

l. Penyelenggaraan penataan ruang;

m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

n. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Pelaksanaan tugas fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dibagi habis ke dalam jabatan struktural, Fungsional dan pelaksana berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 133 tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub DIY Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pergub tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana
1. Kepala Dinas	1. Dibawah Sekretaris : a. Fungsional Perencana b. Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan c. Pengolah Data
2. Sekretaris:	2. Dibawah Kasubbag Umum dan Kepegawaian: a. Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana b. Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana
a. subbagian Umum dan Kepegawaian	3. Dibawah Kasubbag Keuangan : a. Verifikator Keuangan b. Pengelola Akuntansi c. Pengelola Keuangan d. Bendahara
b. subbagian Keuangan dan Aset	4. Dibawah Kepala Bidang Sumber Daya Air : a. Fungsional Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda b. Fungsional Penata Laksana Sumber Daya Air Pelaksana c. Fungsional Teknik Pengairan Ahli Pertama d. Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air e. Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan f. Pengawas Irigasi g. Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi h. Analis Pengelolaan Sumber Daya Air i. Pengelola Keuangan
3. Bidang Sumber Daya Air	5. Dibawah Kepala Bidang Bina Marga : a. Fungsional Penate Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda b. Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama c. Pengawas Jalan dan Jembatan d. Analis Sistem Jaringan Jalan Jembatan e. Pemeriksa Jalan dan Jembatan f. Penilik Jalan g. Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan
4. Bidang Bina Marga	6. Dibawah Kepala Bidang Bina Konstruksi: a. Fungsional Pembina Jasa Kontruksi Ahli Muda b. Penelaah Mutu Konstruksi c. Analis Pengelolaan Sumber Daya Air d. Pengelola Keuangan
5. Bidang Bina Konstruksi	7. Dibawah Kepala Bidang Penataan Ruang: a. Fungsional Penata Ruang Ahli Muda b. Fungsional Penata Ruang Ahli Pertama c. Analis Pemanfaatan Ruang d. Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang e. Pengelola Keuangan
6. Bidang Penataan Ruang	8. Dibawah Bidang Sanitasi dan Permukiman: a. Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahti Muda b. Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama c. Pengelola Keuangan
7. Bidang Sanitasi dan Permukiman	9. Dibawah Kepala Bidang Bangunan Gedung : a. Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda b. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama c. Analis Bangunan Gedung dan Permukiman d. Pengadministrasi IMB Gedung atau Bangunan e. Pengelola Keuangan
8. Bidang Bangunan Gedung	
9. UPTD	

D. Isu Strategis

Isu strategis merupakan isu yang menjadi masalah mendesak, mempunyai pengaruh terhadap pencapaian tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat memberikan pelayanan penyediaan infrastruktur yang memadai. Apabila diidentifikasi dan dirumuskan ada beberapa isu strategis yang mempengaruhi pencapaian penyediaan infrastruktur yang memadai, antara lain sebagai berikut :

- 1. Mempertahankan/Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Jalan dan Jembatan;
- 2. Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi (operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi);
- 3. Penyediaan dokumen rencana detail tata ruang;
- 4. Peningkatan pelayanan informasi jasa kontruksi;
- 5. Peningkatan fungsi Drainase Jalan dan penyediaan trotoar;
- 6. Pengendalian alih fungsi lahan;
- 7. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan sumber daya air;
- 8. Masih rendahnya cakupan pelayanan air bersih;
- 9. Belum adanya Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terpadu (IPLT);
- 10. Masih banyaknya bangunan gedung, rumah tinggal yang belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB);
- 11. Belum efektifnya pengendalian dan pengawasan bangunan gedung yang ada di Kabupaten Cirebon;
- 12. Kurangnya kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, longsor dan kekumuhan.

E. Sumber Daya Manusia dan Sarana-Prasarana

Jumlah Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri dari ASN sebanyak 183 orang, dapat terlihat pada tabel halaman berikutnya :

Tabel I.1
Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Jabatan	Formasi						Pegawai yang ada						Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi						L	P
			S2	S1	D4/D3	SLTA	SD	S2	S1	D4/D3	SLTA	SLTP	SD		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi														
	JPT Pratama	1		1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
B.	Jabatan Administrasi														
	1. Administrator	7		7	0	0	0	7	1	6	0	0	0	7	0

No	Jabatan	Formasi						Pegawai yang ada						Jenis Kelamin		
		Jml	Kualifikasi					Jml	Kualifikasi					L	P	
	2. Pengawas	22		22	0	0	0	21	1	19	1	0	0	0	20	1
	3. Pelaksana	540		151	31	335	21	111	0	25	5	73	4	4	192	9
C.	Fungsional	101		93	8	0	0	43	1	39	3	0	0	0	39	4
	Jumlah	671	0	274	39	0	21	183	3	40	9	70	4	4	189	14

Berdasarkan data pada tabel I.1, Jumlah pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten sejumlah 183 orang terdiri dari Dinas 87 orang, UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah I 12 orang, UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah II 16 orang, UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah III 19 orang, UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah IV 8 orang, UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah V 13 orang, UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VI 10 orang, UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VII 6 orang, UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VIII 5 orang, UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi 5 Orang dan UPTD Peralatan dan Perbengkelan 12 Orang. Tingkat pendidikan SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon tidak merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 70 orang (38,29%), disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 40 orang (21,86%), D4/D3 sebanyak 9 orang (4,92%), SMP sebanyak 4 orang (2,19%), SD sebanyak 4 orang (2,19%) dan S2 sebanyak 3 orang (1,64%). Komposisi pegawai laki-laki (92,35%) lebih banyak dibanding pegawai perempuan (7,65%), Berdasarkan Formasi dengan dengan jumlah pegawai saat ini masih terdapat kekurangan pegawai 488 orang.

Tabel I.2
Sarana Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Nilai Aset
1	Gedung Kantor	Unit	25	11.577.662.947,46
2	Tanah	m ²	824	213.466.429.437,50
3	Alat Berat	Unit	89	2.431.573.932,19
4	Alat Bengkel	Unit/Buah	113	557.635.707,66
5	Kendaraan (Roda 10, 6, 4, 3 dan 2)	Unit	59	5.441.462.158,56
6	Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tanggga	Unit/Buah	1.469	4.358.090.810,24
7	Alat Laboratorium	Unit	96	2.861.518.317,67

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon, mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2024, selain memiliki Target Kinerja Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga mempunyai tugas dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi dan lain-lain PAD yang sah, dapat terlihat pada tabel dihalaman berikutnya :

Tabel I.3
Anggaran Tahun 2024

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)
4			PENDAPATAN DAERAH	24.109.530.447	13.546.675.000	(10.562.855.447)
4.	1.		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24.109.530.447	13.546.675.000	(10.562.855.447)
4.	1.	02.	Retribusi Daerah	24.101.530.447	13.538.675.000	(10.562.855.447)
4.	1.	04.	Lain-lain PAD yang Sah	8.000.000	8.000.000	-
			PENDAPATAN	24.109.530.447	13.546.675.000	(10.562.855.447)
5.			BELANJA DAERAH	283.779.671.802	323.799.744.502	40.020.072.700
5.	1.		BELANJA OPERASI	85.789.795.102	112.739.332.762	26.949.537.660
5.	1.	01.	Belanja Pegawai	25.454.575.600	26.972.754.600	1.518.179.000
5.	1.	02.	Belanja Barang dan Jasa	39.126.569.660	53.724.728.320	14.598.158.660
5.	1.	05.	Belanja Hibah	21.208.649.842	32.041.849.842	10.833.200.000
5.	2.		BELANJA MODAL	197.989.876.700	211.060.411.740	13.070.535.040
5.	2.	02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.216.000	67.866.000	1.650.000
5.	1.	03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.800.000.000	2.864.885.040	64.885.040
5.	1.	04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	195.123.660.700	208.127.660.700	13.004.000.000
JUMLAH BELANJA				283.779.671.802	323.799.744.502	40.020.072.700
SURPLUS/(DEFISIT)				(259.670.141.355)	(310.253.069.502)	(50.582.928.147)
PEMBIAYAAN NETO				-	-	-

Adanya penambahan anggaran pada perubahan anggaran sebesar Rp. 40.020.072.700, yang penambahan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi Rp. 10.795.760.000,- dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 11.700.000.000,-, yang proses penambahan anggaran pada perubahan penjabaran atau parsial serta pada perubahan anggaran mendapatkan alokasi tambahan yang bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 17.524.312.700 -, merupakan untuk mendukung peningkatan capaian kinerja Pembangunan yang menjadi tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

F. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Tabel I.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Melengkapi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dengan menginfokan perbandingan dengan realisasi kinerja level nasional/internasional	Telah menyajikan informasi mengenai perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level atasnya (Provinsi)

G. Dasar Hukum

Laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian Intern Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;

11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon ;
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

H. Sistematika Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2024, dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I . PENDAHULUAN

Bab ini akan menjabarkan tentang: Gambaran Singkat Organisasi, Isu Strategis Yang Berpengaruh, Tugas Pokok dan Fungsi, Dasar Hukum, Sistematika Penyajian

Bab II . PERENCANAAN KINERJA

Bab ini akan menjabarkan tentang: Rencana Statejik Organisasi yang terdiri dari Visi Misi, Tujuan dan Sasaran, Cara mencapai tujuan dan sasaran. Pada Bab juga menjabarkan mengenai Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang berisi Sasaran, Indikator Sasaran dan Program-program 2022.

Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini akan menjabarkan tentang: Kerangka Pengukuran Kinerja yang menjelaskan mengenai Analisis dan Evaluasi Kinerja, Perbandingan Data Kinerja, Akuntabilitas Keuangan.

Bab IV. PENUTUP

BAB II
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai di tahun 2021 - 2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon disusun dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2024 dengan penetapan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 yang mencakup Tujuan, Sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2023 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja 2023.

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Tujuan

Tujuan dan Sasaran dari unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan penjabaran atau mengacau dari pernyataan Misi Pembangunan Daerah yang sudah dirumuskan, dengan mempertimbangkan Faktor-faktor Kunci Keberhasilan, adapun misi Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon, Tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon adalah :

“Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang baik berbasis Penataan Ruang melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang baik ”

Tabel II.1
Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang lima Tahun

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Kondisi Awal	Target Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang baik berbasis Penataan Ruang melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang baik	Indeks Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Baik	-	63,84	73,67	79,48	80,90	

Sasaran

Sasaran (Objectives) : merupakan penjabaran dari Tujuan, yaitu apa yang akan dicapai pada jangka pendek (tahunan, semesteran atau triwulanan), berupa satuan-satuan pelaksanaan tugas/kegiatan, menggambarkan target-target yang akan dicapai, dan bersifat dapat diukur secara kuantitatif dengan jelas dan mudah. Adapun sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai berikut:

Tabel II.2
Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang lima Tahun

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Sasaran Tahun				Kondisi Akhir Renstra
				2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten	Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap)	83,32%	84 %	85 %	86 %	87 %	87 %
2.	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA	Meningkatnya Prosentase Intensitas Tanam	85,33%	85,67%	86,00%	86,33%	86,67%	86,67%
3.	Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	5,56%	11,11 %	16,67 %	27,78 %	33,33 %	33,33 %
4.	Terciptanya pelayanan jasa kontruksi yang optimal	Persentase layanan informasi jasa kontruksi	40 %	55%	70%	85%	55%	55%
5.	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD	62,67	63,32	71,5	73	75	75
6.	Meningkatnya Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	Prosentase penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	-	37,65%	63,18%	63,72%	64,01%	64,01%

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat sehingga semua program, kegiatan dan Sub. Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi organisasi, Strategi yang telah dirumuskan, dapat terlihat pada halaman berikutnya:

Tabel II.3
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang lima Tahun

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Jaringan Jalan Kabupaten dan Pembangunan Jalan Baru	1. Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Jalan Jembatan 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan Secara Rutin ataupun Periodik/Berkala 3. Pembangunan Saluran/Drainase Jalan 4. Peningkatan data base kondisi jalan dan jembatan 5. Peningkatan pendataan Rumija dan damija 6. Penambahan Peralatan Alat-Alat Berat, Peralata Bengkel Alat Berat dan Peralatan Uji Laboratorium Bahan Kontruksi 7. Pemeliharaan Peralatan Alat-Alat Berat, Peralata Bengkel Alat Berat dan Peralatan Uji Laboratorium Bahan Kontruksi
2.	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA	Peningkatan Kondisi Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi	1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Bangunan Jaringan Irigasi (Pintu Air, Bendung dan lain lain) 2. Pemeliharaan Jaringan Irigasi 3. Peningkatan Peran Komisi Irigasi
		Peningkatan Upaya Penanganan Fungsi dan Infrastruktur Sumber Air	1. Rehabilitasi Bangunan Saluran 2. Pemeliharaan Bangunan Saluran 3. Pembangunan Penampung Air 4. Pemeliharaan Saluran melalui Kurasan dan Normalisasi
3.	Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang	Meningkatkan aturan perencanaan dan pengendalian pengawasan	1. Pembuatan Rencana Detail 2. Pengawasan Pemanfaatan Ruang 3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4.	Terciptanya pelayanan jasa kontruksi yang optimal	Peningkatan Kinerja Pelayanan Jasa Kontruksi	1. Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi tentang jasa kontruksi 2. Penguatan system informasi jasa kontruksi 3. Pengawasan tertib usaha dan penyelenggaraan jasa kontruksi
5.	Meningkatnya Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	1. Meningkatkan Layanan penyediaan Infrastruktur Penyediaan Air Bersih, Sanitasi, persampahan, dan Bangunan Gedung 2. Peningkatan Data Base	1. Penguatan penyusunan Data Base 2. Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Perpipaan kawasan perkotaan dan perdesaan 3. Supervisi Pembangunan, Peningktana, Perluasan dan Perbaikan SPAM dan Sabitasi 4. Rehabilitasi dan Peningkatan Sistem pengelolaan skala perkotaan dan permukiman 5. Pembangunan TPA/TPST/TPS-3 dan TPS 6. Penguatan Aturan bangunan gedung 7. Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan serta pendataan bangunan gedung
6.	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Meningkatkan dan Mengoptimalkan kemampuan Sumber Daya Manusia Yang ada	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Pemeliharaan Sarana dan Parasana Aparatur 3. Penyediaan kebutuhan Rutin aparatur 4. Penyediaan dokumen pelaksanaan dan pelaporan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku

B. Struktur Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Tahun 2024

Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun 2024, sebagaimana di sajikan dalam tabel halaman berikutnya :

Tabel II.4
Struktur Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan terkait langsung
Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp.)	Sesudah Perubahan (Rp.)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)
1. Sasaran Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten			177.511.226.200	185.573.726.200	8.062.500.000
	1.1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	8.909.251.100	9.909.251.100	1.000.000.000
	1.1.1.	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.909.251.100	9.909.251.100	1.000.000.000
	1.1.1.2.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	8.819.555.100	9.819.555.100	1.000.000.000
	1.1.1.1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	89.696.000	89.696.000	-
	1.2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	168.601.975.100	175.664.475.100	7.062.500.000
	1.2.1.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	168.601.975.100	175.664.475.100	7.062.500.000
	1.2.1.1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	448.480.000	648.480.000	200.000.000
	1.2.1.2.	Penggantian Jembatan	4.300.000.000	4.300.000.000	-
	1.2.1.3.	Rekonstruksi Jalan	29.322.088.800	132.072.088.800	2.750.000.000
	1.2.1.4.	Pemeliharaan Berkala Jalan	23.259.958.300	27.372.458.300	4.112.500.000
	1.2.1.5.	Rehabilitasi Jembatan	500.000.000	500.000.000	-
	1.2.1.6.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	329.392.000	329.392.000	-
	1.2.1.7.	Pemeliharaan Rutin Jalan	10.442.056.000	10.442.056.000	-
2. Sasaran Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA			46.037.240.200	60.155.873.900	14.118.633.700
	2.1.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	46.037.240.200	60.155.873.900	14.118.633.700
	2.1.1.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.656.911.300	31.208.062.000	11.551.150.700
	2.1.1.1.	Koordinasi dan SinkronisasiPeningkatan KapasitasKelembagaan Pengelolaan SDAKewenangan Kabupaten/Kota	125.500.000	125.500.000	-
	2.1.1.2.	Normalisasi/Restorasi Sungai	4.770.024.000	12.976.157.700	8.206.133.700
	2.1.1.3.	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	-	200.000.000	200.000.000

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp.)	Sesudah Perubahan (Rp.)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)
	2.1.1.4.	Pembangunan Tanggul Sungai	11.698.363.300	13.448.363.300	1.750.000.000
	2.1.1.5.	Rehabilitasi Tanggul Sungai	2.738.784.000	4.138.784.000	1.400.000.000
	2.1.1.6.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	324.240.000	319.257.000	(4.983.000)
	2.1.2.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.380.328.900	28.947.811.900	2.567.483.000
	2.1.2.1.	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	19.866.138.900	21.683.621.900	1.817.483.000
	2.1.2.2.	Peningkatan Bendung Irigasi	200.000.000	200.000.000	-
	2.1.2.3.	Rehabilitasi Bendung Irigasi	-	200.000.000	200.000.000
	2.1.2.4.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	5.861.396.000	6.311.396.000	450.000.000
	2.1.2.5.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	452.794.000	552.794.000	100.000.000
3. Sasaran Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang			2.841.924.700	2.841.924.700	-
	3.1.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	224.848.000	224.848.000	-
	3.1.1.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	224.848.000	224.848.000	-
	3.1.1.1.	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	224.848.000	224.848.000	-
	3.2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.617.076.700	2.617.076.700	-
	3.2.1.	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RRCR Rinci Tata Ruang (RRTR Kabupaten/Kota	2.166.721.800	2.166.721.800	-
	3.2.1.1.	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	2.166.721.800	2.166.721.800	-
	3.2.2.	Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	240.804.500	240.804.500	-
	3.2.2.1.	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	240.804.500	240.804.500	-

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp.)	Sesudah Perubahan (Rp.)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)
	3.2.3.	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	209.550.400	209.550.400	-
	3.2.3.1.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	209.550.400	209.550.400	-
4. Sasaran Terciptanya pelayanan jasa konstruksi yang optimal			502.595.500	502.595.500	-
	4.1.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	502.595.500	502.595.500	-
	4.1.1.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	305.033.300	305.033.300	-
	4.1.1.1.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	207.488.000	207.488.000	-
	4.1.1.2.	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	97.545.300	97.545.300	-
	4.1.2.	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	197.562.200	197.562.200	-
	4.1.2.1.	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	98.642.900	98.642.900	-
	4.1.2.2.	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	98.919.300	98.919.300	-
5. Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan			29.105.398.260	30.723.577.260	1.618.179.000
	5.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	29.105.398.260	30.723.577.260	1.618.179.000
	5.1.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	103.880.100	101.530.100	(2.350.000)
	5.1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.474.300	49.454.300	(2.020.000)
	5.1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.405.800	52.075.800	(330.000)
	5.1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.510.828.900	27.029.007.900	1.518.179.000
	5.1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.460.615.500	26.978.794.500	1.518.179.000
	5.1.2.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.800	4.999.800	-

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp.)	Sesudah Perubahan (Rp.)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)
	5.1.2.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	45.213.600	45.213.600	-
	5.1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	240.000.000	240.000.000	-
	5.1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	240.000.000	240.000.000	-
	5.1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	601.863.800	625.541.000	23.677.200
	5.1.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.300	9.999.300	-
	5.1.4.2.	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	-	1.650.000	1.650.000
	5.1.4.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.670.000	11.670.000	-
	5.1.4.4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	79.999.900	79.999.900	-
	5.1.4.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	95.760.000	95.760.000	-
	5.1.4.6.	Penyediaan Bahan/Material	148.160.700	148.160.700	-
	5.1.4.7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	5.000.000	-
	5.1.4.8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.282.200	223.309.400	22.027.200
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	49.991.700	49.991.700	-
	5.1.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	519.715.960	526.364.120	6.648.160
	5.1.6.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	519.715.960	526.364.120	6.648.160
	5.1.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.129.109.500	2.201.134.140	72.024.640
	5.1.7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236.283.600	162.023.200	(74.260.400)
	5.1.7.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.175.000	35.175.000	-
	5.1.7.3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	667.477.000	667.477.000	-
	5.1.7.4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.904.900	175.904.900	-
	5.1.7.5.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	62.790.000	62.790.000	-

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp.)	Sesudah Perubahan (Rp.)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)
	5.1.7.6.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	886.819.000	1.033.104.040	146.285.040
	5.1.7.7.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	64.660.000	64.660.000	-
6.Sasaran Meningkatnya Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung			27.781.286.942	44.002.046.942	16.220.760.000
	6.1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	17.897.213.842	22.109.713.842	4.212.500.000
	6.1.1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	17.897.213.842	22.109.713.842	4.212.500.000
	6.1.1.1.	Penyusunan Rencana,Kebijakan, Strategi dan TeknisSistem Penyediaan Air Minum(SPAM)	109.848.000	209.848.000	100.000.000
	6.1.1.2.	Peningkatan Sistem PenyediaanAir Minum (SPAM) JaringanPerpipaan	2.179.696.000	2.179.696.000	-
	6.1.1.3.	Pembinaan Pengelolaan danPengembangan SistemPenyediaan Air Minum (SPAM) Desa	77.696.000	77.696.000	-
	6.1.1.5	Pembangunan SistemPenyediaan Air Minum (SPAM)Jaringan Perpipaan	15.529.973.842	19.642.473.842	4.112.500.000
	6.2.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	200.000.000	200.000.000
	6.2.1.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	200.000.000	200.000.000
	6.2.1.1	Pembangunan TPAT/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	-	200.000.000	200.000.000
	6.3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	800.936.000	11.696.696.000	10.895.760.000
	6.3.1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	800.936.000	11.696.696.000	10.895.760.000
	6.3.1.1.	Peningkatan Sistem PengelolaanAir Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Permukiman	641.392.000	11.437.152.000	10.795.760.000
	6.3.1.2.	Penyusunan Rencana,Kebijakan, Strategi dan TeknisSistem Pengelolaan Air LimbahDomestik (SPALD)	159.544.000	259.544.000	100.000.000

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp.)	Sesudah Perubahan (Rp.)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)
	6.4.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9.083.137.100	9.995.637.100	912.500.000
	6.4.1.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	9.083.137.100	9.995.637.100	912.500.000
	6.4.1.1.	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7.473.274.200	8.085.774.200	612.500.000
	6.4.1.2.	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	74.848.000	74.848.000	-
	6.4.1.3.	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten /Kota	474.847.800	774.847.800	300.000.000
	6.4.1.4.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	74.848.000	74.848.000	-
	6.4.1.5.	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	985.319.100	985.319.100	-
Jumlah			283.779.671.802	323.799.744.502	40.020.072.700

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan kinerja atau kesepakatan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun, penetapan Kinerja sebagaimana Berikut :

Tabel II.5
Matriks Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Target Kinerja	
					Sebelum	Sesudah
1.	Tujuan Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang baik berbasis Penataan Ruang melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang baik	Indeks Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Baik	$\frac{\text{Jumlah Kumulatif persentase Kondisi Jalan Mantap, Kondisi Jaringan Irigasi Baik dan Persentase kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman}}{3}$	Prosen	80,90	80,90
1.1.	Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten	Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap)	$\frac{\text{Jumlah Kondisi Jalan Baik dan Sedang}}{\text{Total Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100$	Prosen	87	87
1.2.	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA	Meningkatnya persentase Intensitas Tanam	$\frac{\text{Realisasi Tanam I, II dan III}}{300} \times 100$	Prosen	86,67	86,67
1.3.	Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	$\frac{\text{Jumlah Realisasi kebijakan pembangunan}}{\text{Jumlah Kebijakan pembangunan yang ada pada RTRW}} \times 100$	Prosen	33,33	33,33
1.4.	Terciptanya pelayanan jasa konstruksi yang optimal	Persentase layanan informasi jasa konstruksi	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Layanan Informasi}}{\text{Jumlah Layanan yang direncanakan}} \times 100$	Prosen	100	100
1.5.	Meningkatnya kinerja aparaturnya dan kualitas pelayanan	Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD	Hasil Penilaian LKIP SKPD oleh Inspektorat	Point	75	75
1.6.	Meningkatnya Kualitas penyediaan sistem air minum, Persampahan, Airlimbah dan Bangunan Gedung	Persentase penyediaan sistem air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	$\frac{\text{Jumlah kumulatif capaian Persentase Penduduk berakses Air Minum, Persentase Bangunan Penampungan Sampah yang terbangun, Persentase Rumah Tinggal bersanitasi dan Rasio bangunan ber IMB Persatuan Bangunan}}{4}$	Prosen	64,01	64,01

Keterangan

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut diatas terdapat dukungan anggaran sebagai Berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp.)	
		Sebelum	Sesudah
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	8.909.251.100	9.909.251.100
2.	Program Penyelenggaraan Jalan	168.601.975.100	175.664.475.100
3.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	46.037.240.200	60.155.873.900
4.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	224.848.000	224.848.000
5.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.617.076.700	2.617.076.700
6.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	502.595.500	502.595.500

No.	Program	Anggaran (Rp.)	
		Sebelum	Sesudah
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29.105.398.260	30.723.577.260
8.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	17.897.213.842	22.109.713.842
9.	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	200.000.000
10.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	800.936.000	11.696.696.000
11.	Program Penataan Bangunan Gedung	9.083.137.100	9.995.637.100
JUMLAH		283.779.671.802	323.799.744.502

2. Data kinerja tersedia pada Triwulan IV akhir
 Keterangan Tambahan

Indikator Kinerja dan Target Kinerja tidak berubah, tetapi alokasi anggaran bertambah 14,10 %, adanya penambahan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Bantuan Keuangan Provinsi dan APBD untuk meningkatkan ketercapaian kinerja serta penanganan – penanganan Infrastruktur yang bersifat sangat penting untuk dilakukan tindakan.

D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. E-Perencanaan (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah)

E-Perencanaan merupakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang mendukung pencapaian kinerja setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan Dokumen Perencanaan, mengawal proses perencanaan serta merespon aspirasi Masyarakat dan awal penyusunan anggaran . Tampilan E-Perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar II.1 Instrumen Pendukung 1



Instrumen ini mendukung dalam penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja dan memonitor pencapaian kinerja dan realisasi anggaran bagi setiap perangkat daerah di Kabupaten Cirebon, yang pelaksanaan pelaporannya dilakukan oleh setiap perangkat daerah setiap bulan dan diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta sebagai base data dalam evaluasi yang dilakukan per triwulan. Tampilan Simonek dapat terlihat pada gambar berikut :




Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Hasil Monitoring dan Evaluasi Terhadap Rencana SKPD 2020

Hasil Monitoring Hasil Evaluasi

No	Nama SKPD	Jml. Ptg	Jml. Krg	Anggaran Pagu	Sesapan	Rasio
1	DINAS PENDIDIKAN	11	553	100.745.407.840,00	63.716.550.772,00	62,87 %
2	DINAS KESEHATAN	22	148	165.778.470.020,00	122.274.226.474,00	73,83 %
3	DINAS PERENCANAAN, KEMASRAKURAHAN DAN KEBUDAYAAN	18	39	172.233.553.118,00	112.224.129.407,00	64,59 %
4	SATUAN PELAKSANA PEMERINTAH DAERAH	18	37	15.405.007.100,00	10.204.207.000,00	66,24 %
5	DINAS PADUKA PASUKAN	39	124	1.889.291.140,00	1.387.279.538,00	73,43 %
6	DINAS PERENCANAAN KEMASRAKURAHAN	9	18	1.037.577.520,00	722.057.370,00	69,78 %
7	DINAS BOKAL	11	30	6.596.190.000,00	4.372.945.476,00	66,31 %
8	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	9	25	4.262.045.100,00	2.742.205.410,00	64,32 %
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11	12	32.370.120.000,00	20.645.244.000,00	63,80 %
10	DINAS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PERENCANAAN	30	40	6.107.530.100,00	4.175.243.240,00	68,35 %
11	DINAS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PERENCANAAN	9	40	2.498.148.074,00	1.789.432.477,00	71,61 %
12	DINAS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PERENCANAAN	18	35	15.534.412.020,00	10.174.217.700,00	65,51 %
13	DINAS PERENCANAAN	11	40	4.402.918.000,00	2.748.104.000,00	62,41 %
14	DINAS KECERDASAN DAN INOVASI	11	38	12.545.520.000,00	7.914.493.714,00	62,99 %
15	DINAS KOPERASI, USAHA KEUSAHAAN KEMASRAKURAHAN	11	38	7.251.700.000,00	4.754.474.760,00	65,57 %
16	DINAS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PERENCANAAN	11	37	2.240.132.000,00	1.375.784.216,00	61,39 %
17	DINAS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PERENCANAAN	18	40	7.232.634.000,00	4.206.103.881,00	58,16 %
18	DINAS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PERENCANAAN	9	39	1.248.020.140,00	726.290.124,00	58,27 %
19	DINAS KELAYAKAN DAN KEMAMPUAN	11	38	2.026.784.687,00	1.210.278.912,00	59,70 %
20	DINAS PERTANIAN	11	36	8.231.244.000,00	4.824.154.470,00	58,60 %
21	DINAS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PERENCANAAN	18	31	3.711.899.000,00	1.687.230.320,00	45,44 %
22	KABUPATEN KEMASRAKURAHAN DAN KEBUDAYAAN	17	72	6.440.515.100,00	3.545.700.000,00	55,04 %

Dinas Hukam

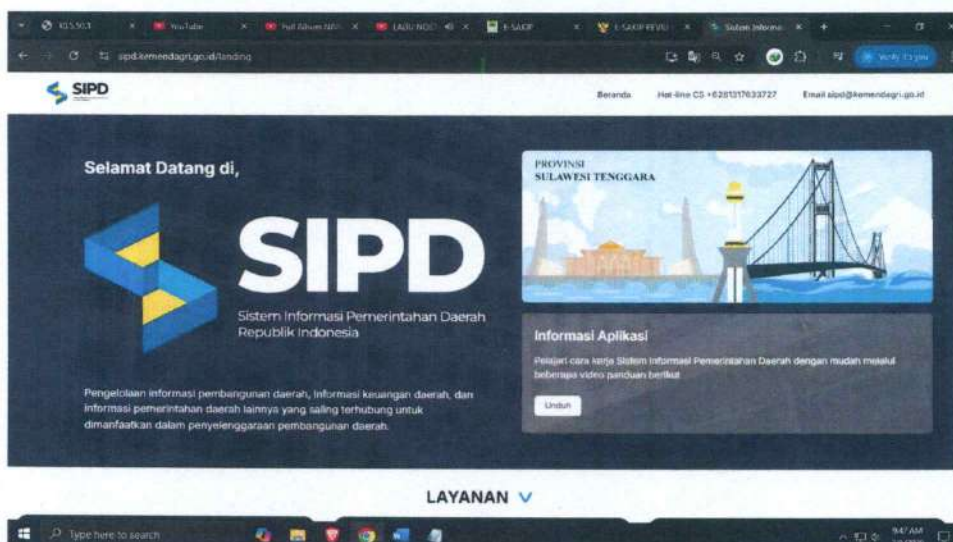
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008

Pemerintah No. 66 Tahun 2017

Pemerintah No. 83 Tahun 2014

SIPD merupakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang mendukung pencapaian kinerja setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan realisasi anggaran, yang dibangun oleh Kementerian dalam negeri, sebagai upaya dalam penyusunan perencanaan dan keuangan daerah lebih mudah dilakukan secara elektronik serta untuk memudahkan dalam analisa data daerah secara nasional, Tampilan SIPD dapat terlihat pada gambar pada halaman berikutnya:

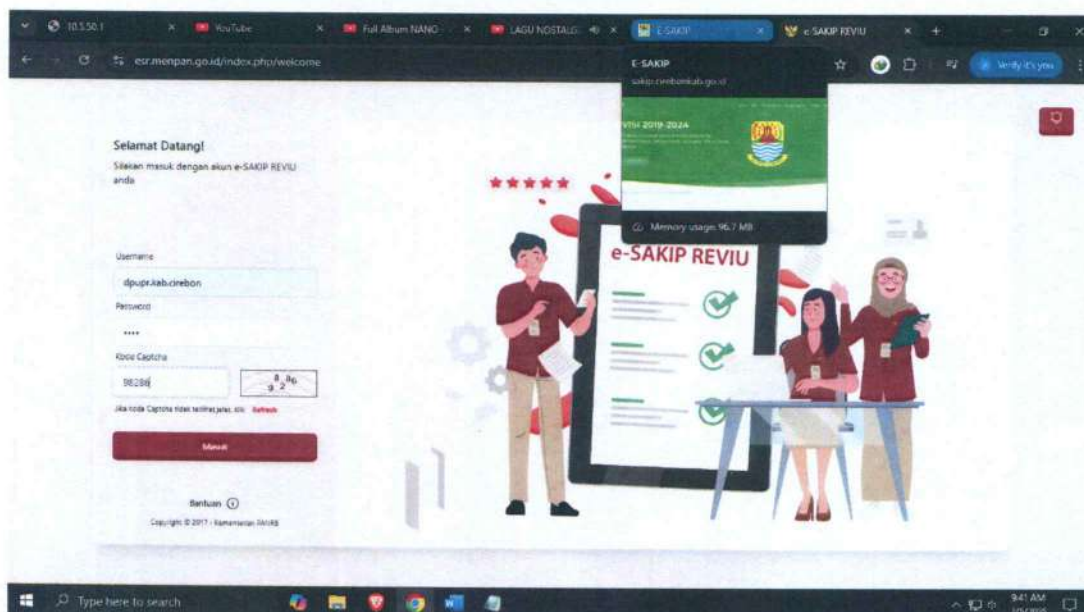
Gambar II.3 Instrumen Pendukung 3



4. Esr.menpan (E-SAKIP Reviu)

Instrumen ini mendukung dalam penilaian atas laporan kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota beserta Perangkat Daerah pada Provinsi/Kabupaten/Kota, sistem aplikasi ini dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sistem ini bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online. Tampilan Esr.menpan dapat terlihat pada gambar berikut:

Gambar II.4 Instrumen Pendukung 4



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Cirebon telah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Cirebon yang dibuat sesuai dengan PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Laporan memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Cirebon.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan

program, kegiatan dan Sub. Kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu :

- (1) data internal berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi;
- (2) data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat efisiensi dan efektifitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi data, yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mewajibkan menyampaikan laporan data kinerja bulanan, triwulanan, dan semesteran.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak akan diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja mencakup :

- 1) Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
- 2) Tingkat pencapaian sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dimaksudkan dalam laporan kinerja ini, adalah untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2024, guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategik tersebut. Dalam kerangka pengukuran kinerja

ini terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Adapun mengenai rumus yang digunakan untuk pengukuran kinerja ini adalah sebagai berikut:

Rumus 1:

$$\frac{\text{Persentase Pencapaian Rencana}}{\text{Rencana}} = \frac{\text{Realisasi Tahun } t}{\text{Target Rencana Tahun } t} \times 100$$

Rumus 2:

$$\frac{\text{Persentase Peningkatan/Penurunan capaian Kinerja}}{\text{capaian Kinerja}} = \frac{\text{Realisasi Thn } t - \text{Realisasi Thn } t-1}{\text{Realisasi Tahun } t-1} \times 100$$

Rumus 3:

$$\frac{\text{Persentase Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya}}{\text{Tahun Sebelumnya}} = \frac{\text{Realisasi Thn } t}{\text{Realisasi Tahun } t-1} \times 100$$

Rumus 4:

$$\frac{\text{Persentase Perbandingan dengan Target Jangka Menengah}}{\text{Target Jangka Menengah}} = \frac{\text{Realisasi Thn Awal Renstra sd Thn } t}{\text{Target Akhir Renstra Tahun } n} \times 100$$

Untuk memberikan makna terhadap nilai persentase pencapaian kinerja tersebut, maka ditentukan melalui skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Baik
2.	76% ≤ 90%	Baik
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

B. Pengukuran Pencapaian Kinerja

1. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

Tingkat capaian kinerja tujuan dan masing-masing Indikator kinerja Sasaran tersebut diuraikan dalam tabel pada halaman berikutnya :

Tabel III.1
 Capaian Indikator Tujuan
 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon
 Tahun 2024

No.	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024		Capaian	Kriteria Kinerja	Target Akhir Renstra
					Target	Realisasi			
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Baik	%	83,80	85,69	80,9	84,57	104,54	Sangat Baik	80,90

Dari tabel capaian indikator tujuan yang digambarkan pada tabel capaian indikator tujuan, maka diperoleh capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar 104,60%, realiasasi kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 yang merupakan target akhir renstra 2019-2024, target untuk tahun 2024 sebesar 80,90% dengan realisasi 84,57% dengan kriteria kinerja **Sangat Baik**, jika di bandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 1,12% hal ini dikarenakan, terdapat 2 indikator kinerja yang mengalami penurunan yaitu Persentase penduduk berakses air minum yang pada tahun 2023 realisasi 94,89% ditahun 2024 realisasi 92,31% mengalami penurunan sebesar 2,58% dan Kondisi Jaringan Irigasi Baik pada tahun 2023 realisasi 73,91% ditahun 2024 realisasi 71,60% mengalami penurunan sebesar 2,31%, sehingga berpengaruh terhadap realisasi tujuan.

Tabel III.2
 Capaian Indikator Kinerja Sasatan Tahun 2024
 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024		Capaian %	Kategori Capaian	Target Akhir Renstra
					Target	Realisasi			
1.	Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap)	%	84,12	84,56	87	84,91	97,91	Sangat Baik	87
2.	Meningkatnya persentase Intensitas Tanam	%	88	89	86,67	91,33	105,38	Sangat Baik	86,67
3	Ketaatan terhadap RTRW	%	16,67	22,22	33,33	33,33	100,01	Sangat Baik	33,33
4	Persentase layanan informasi jasa kontruksi	%	70	85	100	100	100,00	Sangat Baik	100
5	Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD	Point	68,92	73,7	75	74,50	99,33	Sangat Baik	75
6	Prosentase penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	%	45,40	46,73	64,01	47,31	73,90	Sedang	64,01

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut

1.1. Sasaran 1 : Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten

Kinerja sasaran Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten diukur dengan indikator Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap), indikator kinerja dan rumus perhitungan adalah sebagai berikut :

Tabel III.3
Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1

No.	Sasaran	Indikator	Pengukuran
1.1.	Meningkatnya Kondisi Jaringan JalanKabupaten	Persentase kondisi jalan Kabupaten baik danSedang (Mantap)	$\frac{\text{Jumlah Kondisi Jalan Baik dan Sedang}}{\text{Total Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100$

Tabel III.4
Target dan Realisasi kinerja Sasaran 1 Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 terhadap Target Akhir Renstra (%)
					Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten	Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap)	84,12%	84,56%	87%	84,91% ((758,68+ 294,42)/ 1.240,30= 84,91%)	97,60% ((84,91%/ 87%) x100%)	87%	97,60%

Analisis ketercapaian Sasaran 1 : Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten adalah sebagai berikut

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terus berupaya meningkatkan kondisi Jalan di Kabupaten Cirebon dapat tergambarkan pada tabel realisasi bahwa pada setiap tahunnya mengalami kenaikan walaupun realisasi di tahun 2024 atau diakhir tahun akhir renstra belum tercapai, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1. Realisasi sebesar 84,91% dengan demikian prosentase capaian di tahun 2024 terhadap target sebesar 97,60% (belum terpenuhi)
- 2. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,35%.
- 3. Capaian realisasi pada tahun 2024 terhadap target akhir renstra 97,60% (belum terpenuhi)

Peningkatan kondisi jalan menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mendukung peningkatan konektifitas antar wilayah, peningkatan perekonomian masyarakat dan menggefesiensikan waktu dalam pendistribusian barang atau jasa serta transportasi, Kondisi Jalan Kabupaten akhir tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.5
Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2024

No.	Kondisi Jalan	Panjang Jalan		Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
		Km	%		Km	%
1.	Mantap	1.053,10	84,91	Baik	758,68	61,17
				Sedang	294,42	23,74
2.	Tidak Mantap	187,2	15,09	Rusak Ringan	91,32	7,36
				Rusak Berat	95,88	7,73

Untuk mendukung pencapaian keberhasilan indikator kinerja sasaran 1 Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten didukung oleh keberhasilan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan sebagai berikut :

Tabel III.6
Capaian Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan terhadap Sasaran 1

No.	Program	Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	4,82%	6,19%	128,42%
		1.1. Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Panjang Saluran Drainase dan Trotoar Jalan	67,73%	76,77%	113,35%
		1.1.1. Sub. Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	40 Sistem Drainase Perkotaan	47 Sistem Drainase Perkotaan	117,50%
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi Baik	60,00%	61,17%	101,95%

No.	Program	Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Panjang Jalan Kabupaten yang di rehabilitasi / direkontruksi dltahun berjalan	9,14%	9,02%	98,69%
		2.1.1. Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
		2.1.2. Sub. Kegiatan Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	4 Jembatan	4 Jembatan	100%
		2.1.3. Sub. Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	71.10 KM	75,03 Km	105,53%
		2.1.4. Sub. Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	35 KM	36,81 Km	105,17%
		2.1.5. Sub. Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1 Jembatan	1 Jembatan	100,00%
		2.1.6. Sub. Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1.240,30 KM	1.240,30 KM	100%
		2.1.7. Sub. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	310,51 KM	386 Km	124,31%

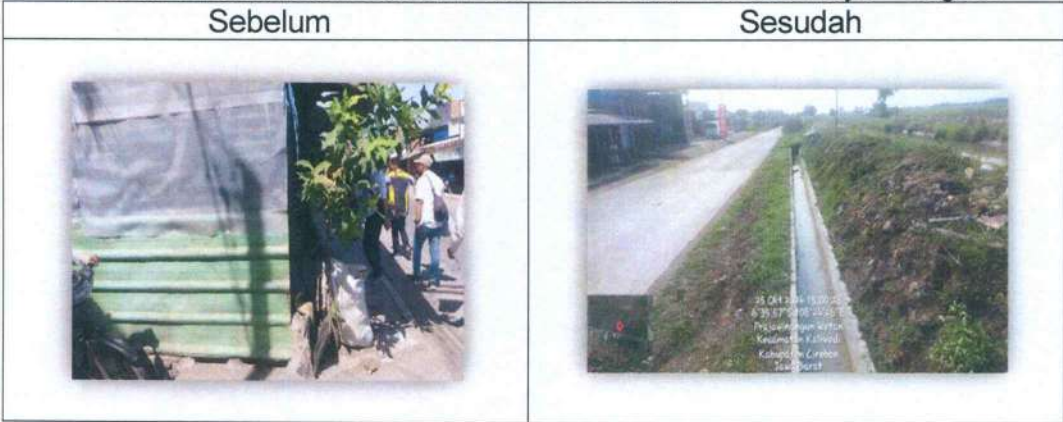
Capaian tersebut di dukung dari :

a. Capaian Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Indikator program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yaitu Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 4,82% terealisasi sebesar 6,19% dengan capaian 128,42% dari Target. Perhitungan realiasi dihitung dari Jumlah Kumulatif Panjang Saluran dan Panjang Trotoar yang dibangun pada setiap tahun dibagi total panjang jalan Kabupaten = ((63,60 Km + 13,16 Km)/1.240,30 Km)x100 = 6,19%

1. Jumlah Komulatif Panjang saluran merupakan hasil dari penjumlahan panjang saluran yang telah dibangun pada Ruas Jalan Kabupaten sampai dengan Tahun 2023 sepanjang 60,85 Km ditambah pelaksanaan pembangunan ditahun 2024 sepanjang 2,76 Km jadi total panjang saluran sampai dengan tahun 2024 sepanjang 63,60 Km.

Foto III.1 Pembuatan Saluran Pada Ruas Jalan Kertasemaya - Gegesik



2. Jumlah Komulatif Panjang Trotoar merupakan hasil dari penjumlahan panjang Trotoar yang telah dibangun pada Ruas Jalan Kabupaten sampai dengan Tahun 2023 sepanjang 12,88 Km ditambah pelaksanaan pembangunan ditahun 2024 sepanjang 0,28 Km jadi total panjang Trotoar sampai dengan tahun 2024 sepanjang 13,16 Km.

Foto III.2 Pembuatan Trotoar Pada Ruas Jalan Jatiseeng-Pabuaran



b. Capaian Program Penyelenggaraan Jalan

Indikator program Penyelenggaraan Jalan yaitu Persentase jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi Baik. Target indikator ini ditahun 2024 sebesar 60% terealisasi sebesar 61,17% dengan capaian 101,95% dari Target. Perhitungan berdasarkan panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik di akhir tahun 2024 dibagi total panjang jalan Kabupaten jalan = (758,68/1.240,30 Km)x100 = 61,17%

Foto III.3 Peningkatan Jalan Arjawinangun - Suranenggala
Sebelum Sesudah



Foto III.3 Pemeliharaan Berkala Jalan Sindanglaut -Ciawigajah
Sebelum Sesudah

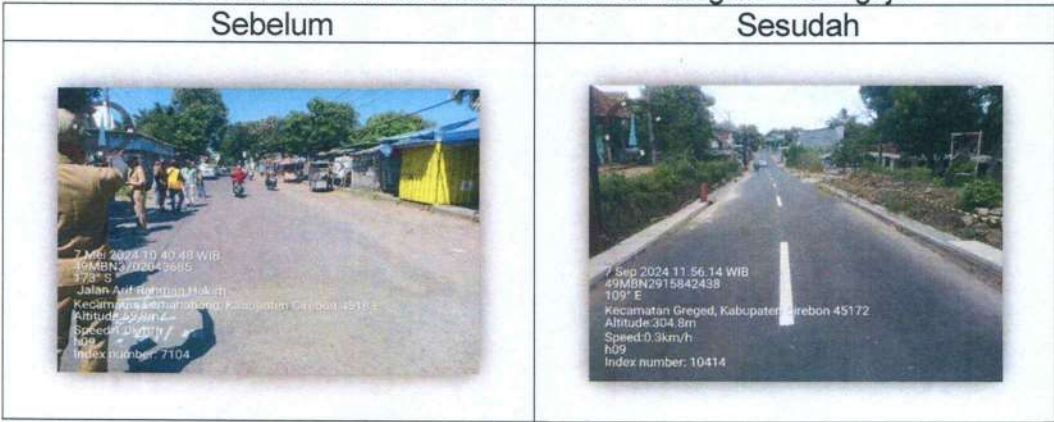


Foto III.4 Peningkatan Jembatan Cempaka- Karangsari
Sebelum Sesudah



Foto III.5 Rehabilitasi Jembatan Gantung Pada Ruas Jalan Cihowe -Tonjong
Sebelum Sesudah



Tabel III.7
Analisa faktor Pendorong, Penghambat dan Solusi
Sasaran 1

No.	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1.	Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap)	1. Adanya program prioritas Pembangunan Daerah dalam hal infrastruktur Jalan 2. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan	1. Penanganan jalan belum berbanding lurus dengan kebutuhan penanganan jalan terutama Pemeliharaan Berkala dan Rutin Jalan 2. Belum seluruhnya ruas jalan memiliki drainase Jalan yang dapat mempercepat kerusakan jalan akibat adanya genangan air pada badan jalan 3. Kurang berfungsinya Drainase Jalan 4. Beban Kendaraan yang melebihi kelas Jalan Kabupaten	1. Penanganan jalan dilakukan secara berkelanjutan melalui skala prioritas penanganan 2. Penggunaan konstruksi rigid pavement terhadap ruas jalan yang lapisan tanahnya labil dan ruas jalan yang tidak memiliki sistem Drainase 3. Pembangunan saluran jalan secara berkesinambungan 4. Perlu koordinasi lintas Stakeholder terhadap fungsi Jalan

1.2. Sasaran 2 :

Kinerja sasaran Meningkatnya persentase Intensitas Tanam diukur dengan indikator Meningkatnya Prosentase Intensitas Tanam, indikator kinerja dan rumus perhitungan adalah sebagai berikut :

Tabel III.8
Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2

No.	Sasaran	Indikator	Pengukuran
1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA	Meningkatnya persentase Intensitas Tanam	$\frac{\text{Realisasi Tanam I, II dan III}}{300\%} \times 100$

Tabel III.9
Target dan Realisasi Sasaran 2

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024		Capaian	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 terhadap Target Akhir Renstra (%)
					Target	Realisasi			
1	Sasaran Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA	Meningkatnya Prosentase Intensitas Tanam	88%	89%	86,67%	91,33% (100%+99% +75%)/300% =91,33%	105,38% ((91,33%/ 86,67%) x100%)	86,67%	105,38

Analisis ketercapaian Sasaran 2 : Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA adalah sebagai berikut :

- 1. Realisasi sebesar 91,33% dengan demikian prosentase capaian di tahun 2024 terhadap target sebesar 105,38% (realisasi terlampaui)
- 2. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,33%.
- 3. Capaian realisasi pada tahun 2024 terhadap target akhir renstra 105,38% (realisasi terlampaui)

data realisasi tanam di tahun 2024 dapat terlihat pada halaman berikutnya :

Tabel III.10 Rencana dan Realisasi Tanam 2023/2024

No.	Daerah Irigasi	Luas Fungsional (Ha)	Rencana Tanam (Ha)			Realisasi Tanam (Ha)			Rencana Tanam (Ha)			Realisasi Tanam (Ha)			Rencana Tanam (Ha)			Realisasi Tanam (Ha)			Ket
			MT. I Tahun 2023/2024			MT. I Tahun 2023/2024			MT. II Tahun 2023/2024			MT. II Tahun 2023/2024			MT. III Tahun 2023/2024			MT. III Tahun 2023/2024			
			Padi	Tebu	Palawija	Padi	Tebu	Palawija	Padi	Tebu	Palawija	Padi	Tebu	Palawija	Padi	Tebu	Palawija	Padi	Tebu	Palawija	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26	27
	Kewenangan Pusat																				
1	Rentang	20.567	20.567	-	-	20.567	-	-	20.567	-	-	20.406	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ciwaringin	1.092	1.092	-	-	1.092	-	-	1.092	-	-	1.092	-	-	-	-	439	-	-	-	-
3	Seuseupan	3.822	2.008	1.500	314	2.068	1.503	251	1.281	1.557	984	1.276	1.557	984	-	1.557	-	-	1.508	251	-
4	Cikeusik	6.815	4.261	267	2.287	1.837	399	4.579	3.945	230	2.570	2.481	380	3.921	-	230	4.892	365	-	4.559	-
	Jumlah	32.296	27.928	1.767	2.601	25.564	1.902	4.830	26.885	1.787	3.554	25.255	1.937	4.905	0	1.787	5.331	365	1.508	4.810	-
	Kewenangan Provinsi																				
1	Jamblang	2.141	2.141	-	-	2.141	-	-	2.141	-	-	2.141	-	-	292	-	1.174	1.191	-	-	-
2	Walahr	1.286	1.286	-	-	1.286	-	-	1.286	-	-	1.286	-	-	5	-	594	-	-	594	-
3	Cipager	855	855	-	-	855	-	-	599	-	256	855	-	-	-	-	362	362	-	-	-
4	Setupatok	1.365	1.222	143	-	1.365	-	-	899	101	365	879	-	-	-	101	237	218	-	-	-
5	Ambit	1.543	781	690	72	781	690	72	611	685	247	611	685	247	-	685	-	-	-	-	-
6	Cibacang	259	259	-	-	259	-	-	-	-	-	259	-	-	-	-	-	99	-	-	-
7	Cipurut	134	126	-	8	123	-	11	123	-	11	123	-	11	-	-	53	-	-	5	-
8	Jawa	111	99	-	12	99	-	12	99	-	12	99	-	12	-	-	46	-	-	4	-
9	Mungkal Gajah	27	19	-	8	19	-	8	19	-	8	19	-	8	-	-	25	-	-	3	-
10	Katiga	662	632	14	16	629	10	23	629	10	23	629	10	23	-	-	138	-	-	10	-
11	Panils Lebak	318	318	-	-	318	-	-	223	-	95	318	-	-	-	-	54	54	-	-	-
12	Cisamaya	63	63	-	-	63	-	-	50	-	13	63	-	-	-	-	30	4	-	-	-
13	Cikrongkob	64	64	-	-	64	-	-	64	-	-	64	-	-	-	-	64	64	-	-	-
	Jumlah	8.828	7.865	847	116	8.002	700	126	6.743	796	1.030	7.346	695	301	297	786	2.777	1.992	0	616	-
	Kewenangan Kabupaten																				
1	Jatisawit	687	687	-	-	687	-	-	687	-	-	687	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Daerah Irigasi	Luas Fungsional (Ha)	Rencana Tanam (Ha)			Realisasi Tanam (Ha)			Rencana Tanam (Ha)			Realisasi Tanam (Ha)			Rencana Tanam (Ha)			Realisasi Tanam (Ha)			Ket
			MT. I Tahun 2023/2024			MT. I Tahun 2023/2024			MT. II Tahun 2023/2024			MT. II Tahun 2023/2024			MT. III Tahun 2023/2024			MT. III Tahun 2023/2024			
			Padi	Tebu	Palawija	Padi	Tebu	Palawija	Padi	Tebu	Palawija	Padi	Tebu	Palawija	Padi	Tebu	Palawija	Padi	Tebu	Palawija	
2	Ciparigi	438	432	6	-	438	-	-	351	5	82	438	-	-	-	5	220	127	-	-	
3	Keputon	399	399	-	-	399	-	-	232	20	147	399	-	-	-	20	78	98	-	-	
4	Soka	258	249	9	-	258	-	-	214	12	32	258	-	-	-	12	78	90	-	-	
5	Rajadana	135	135	-	-	135	-	-	94	15	26	135	-	-	-	15	53	68	-	-	
6	Waduk Sedong	168	168	-	-	168	-	-	168	-	-	168	-	-	-	-	47	47	-	-	
7	Panongan	952	786	149	17	774	173	5	774	149	17	774	173	5	-	-	488	372	-	-	
8	Agung	711	403	280	48	402	279	30	402	279	30	402	279	30	155	1	44	176	-	-	
9	Kecepet	477	425	-	52	423	18	36	423	18	36	423	18	36	2	-	258	132	-	-	
10	Ciwado	760	600	104	56	610	110	40	600	120	40	600	138	40	21	-	456	164	-	-	
11	Cangkuang	806	390	301	115	390	301	115	341	301	164	341	301	164	-	-	301	169	-	-	
12	Telaga Remis	90	90	-	-	90	-	-	90	-	-	90	-	-	47	-	-	-	-	-	
13	Tonjong	107	107	-	-	107	-	-	107	-	-	107	-	-	101	-	-	42	-	-	
14	Ciwedus	159	144	15	-	144	15	-	144	-	-	144	-	-	56	-	-	56	-	-	
15	Sigong	99	99	-	-	99	-	-	99	-	-	99	-	-	74	-	25	94	-	-	
16	Sigebang	167	167	-	-	167	-	-	167	-	-	167	-	-	57	-	49	67	-	-	
17	Ciliwotan	64	64	-	-	64	-	-	64	-	-	64	-	-	17	-	47	17	-	47	
18	Dukuh Suwung	93	93	-	-	93	-	-	60	-	44	93	-	11	-	-	44	-	-	93	
19	Gunung Breg	8	8	-	-	8	-	-	8	-	-	8	-	-	-	-	8	-	-	8	
20	Pilang	15	15	-	-	15	-	-	15	-	-	15	-	-	-	-	15	-	-	15	
21	Cibinuang	23	23	-	-	23	-	-	23	-	-	23	-	-	-	-	23	23	-	-	
22	Cigobang	173	173	-	-	173	-	-	173	-	-	173	-	-	-	-	173	173	-	-	
23	Soka Udik	152	125	27	-	152	-	-	59	27	54	152	-	-	-	27	123	150	-	-	
24	Situan I	150	123	27	-	150	-	-	66	27	31	150	-	-	-	27	123	150	-	-	
25	Situan II	158	158	-	-	158	-	-	158	-	-	158	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Cibuluh	248	248	-	-	248	-	-	178	-	60	248	-	-	-	-	225	32	-	-	

No.	Daerah Irigasi	Luas Fungsional (Ha)	Rencana Tanam (Ha)			Realisasi Tanam (Ha)			Rencana Tanam (Ha)			Realisasi Tanam (Ha)			Rencana Tanam (Ha)			Realisasi Tanam (Ha)			Ket
			MT. I Tahun 2023/2024			MT. I Tahun 2023/2024			MT. II Tahun 2023/2024			MT. II Tahun 2023/2024			MT. III Tahun 2023/2024			MT. III Tahun 2023/2024			
			Padi	Tebu	Palawija	Padi	Tebu	Palawija	Padi	Tebu	Palawija	Padi	Tebu	Palawija	Padi	Tebu	Palawija	Padi	Tebu	Palawija	
27	Cirengas	237	237	-	-	237	-	-	153	-	84	237	-	-	-	-	231	18	-	-	
28	Suba	218	218	-	-	218	-	-	218	-	-	218	-	-	-	-	218	41	-	-	
29	Dalem	96	96	-	-	96	-	-	60	-	36	96	-	-	-	-	25	25	-	-	
30	Loa Kudang	113	94	-	19	113	-	-	65	38	10	113	-	-	-	38	24	12	-	-	
31	Kenanga	51	51	-	-	51	-	-	28	-	23	51	-	-	-	-	24	3	-	-	
32	Gedongan	15	15	-	-	15	-	-	10	-	5	15	-	-	-	-	5	5	-	-	
33	Loa	24	24	-	-	24	-	-	14	-	10	24	-	-	-	-	5	5	-	-	
34	Tegal	64	64	-	-	64	-	-	34	-	15	64	-	-	-	-	12	12	-	-	
35	Harikukun	23	23	-	-	23	-	-	23	-	-	23	-	-	-	-	10	10	-	-	
36	Jengkol	27	27	-	-	27	-	-	23	-	4	27	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Mandalangit	46	46	-	-	46	-	-	26	-	20	46	-	-	-	-	112	37	-	-	
38	Tegal Puuk	36	36	-	-	36	-	-	26	-	10	36	-	-	-	-	87	22	-	-	
39	Balong	76	76	-	-	76	-	-	50	-	26	76	-	-	-	-	25	25	-	-	
40	Ranca Tunggal	10	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-	-	-	5	5	-	-	
41	Gronggong	42	42	-	-	42	-	-	22	-	20	42	-	-	-	-	10	10	-	-	
42	Patapan	41	41	-	-	41	-	-	28	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Sawah Banjar	6	6	-	-	6	-	-	6	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-	6	
44	Kleret	12	12	-	-	12	-	-	12	-	-	6	-	-	-	-	12	-	-	6	
45	Suminta	19	19	-	-	19	-	-	19	-	-	19	-	-	-	-	19	-	-	19	
46	Ciawi	378	363	-	15	359	-	19	238	-	135	359	-	19	-	-	130	-	-	45	
47	Plester	72	59	-	13	59	11	2	59	-	13	59	11	2	51	-	21	-	-	5	
48	Cimanis	261	253	8	-	253	6	2	159	-	92	253	6	2	-	-	130	-	-	4	
49	Ketos	363	295	-	68	298	44	21	295	-	68	298	44	21	195	-	158	-	-	21	
50	Sendi	23	23	-	-	23	-	-	13	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	
51	Cigembor	18	18	-	-	18	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	

No.	Daerah Irigasi	Luas Fungsional (Ha)	Rencana Tanam (Ha)			Realisasi Tanam (Ha)			Rencana Tanam (Ha)			Realisasi Tanam (Ha)			Rencana Tanam (Ha)			Realisasi Tanam (Ha)			Ket
			MT. I Tahun 2023/2024			MT. I Tahun 2023/2024			MT. II Tahun 2023/2024			MT. II Tahun 2023/2024			MT. III Tahun 2023/2024			MT. III Tahun 2023/2024			
			Padi	Tebu	Palawija	Padi	Tebu	Palawija	Padi	Tebu	Palawija	Padi	Tebu	Palawija	Padi	Tebu	Palawija	Padi	Tebu	Palawija	
52	Citelang I	9	9	-	-	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	
53	Karoya	7	7	-	-	7	-	-	7	-	-	7	-	-	-	-	7	7	-	-	
54	Umbar	6	6	-	-	6	-	-	6	-	-	6	-	-	-	-	3	3	-	-	
	Jumlah	9.790	8.481	906	403	8.563	957	270	7.328	1.011	1.344	8.448	970	330	776	145	4.179	2.487	0	269	Persentase Tanam (%)
JUMLAH		50.914	44.274	3.520	3.120	42.129	3.559	5.226	40.956	3.594	5.928	41.049	3.602	5.536	1.073	2.718	12.287	4.844	1.508	5.695	MT.I s/d MT.III
				50.914			50.914			50.478			50.187			16.078			12.047		
Persentase (%)						100						99						75			274

Untuk mendukung pencapaian keberhasilan indikator kinerja sasaran 2 Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA didukung oleh keberhasilan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan sebagai berikut :

Tabel III.11
Capaian Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan terhadap Sasaran 2

No.	Program	Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan Persentase Berkurangnya luasan genangan akibat banjir	40,78%	36,33%	89,09%
		1.1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	8,80%	8,80%	100,00%
		1.1.1. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Lembaga	1 Lemabaga	100,00%
		1.1.2. Sub. Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	38,10 KM	41,43 Km	108,74%
		1.1.3. Sub. Kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	9 Unit	1 Unit	11,11%
		1.1.3. Sub. Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	7,39 KM	6,61 Km	89,45%
		1.1.3. Sub. Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	2,15 KM	2,16 Km	100,47%
		1.1.3. Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	4 Dokumen	3 Dokumen	75,00%
		1.2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	76,00%	76,00%	100,00%

No.	Program	Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		1.2.1. Sub. Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	20,80 KM	21,35 Km	102,64%
		1.2.2. Sub. Kegiatan Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	1 Bendung	1 Bendung	100,00%
		1.2.3. Sub. Kegiatan Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	3 Bendung	1 Bandung	33,33%
		1.2.4. Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	6 KM	9,51 Km	158,50%
		1.2.5. Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	5 Dokumen	6 Dokumen	100,00%

Capaian tersebut di dukung dari :

Capaian Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Indikator program Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yaitu Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan Persentase Berkurangnya luasan genangan akibat banjir. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 4,82% terealisasi sebesar 36,30% dengan capaian 89,01% dari Target. Perhitungan realiasi dihitung dari Prosentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik dan Luasan Genangan akibat banjir = (1,07%+71,6%)/2 x 100% = 36,33%

1. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik merupakan hasil dari perhitungan panjang jaringan irigasi dalam kondisi Baik dibagi total panjang jaringan irigasi Kabupaten = (122.874 Meter/171.613 Meter x 100%=71,60%)
2. Persentase Berkurangnya luasan genangan akibat banjir merupakan hasil dari perhitungan luas genangan banjir di lahan pertanian yang terjadi ditahun 2024 dibagi luas kawasan rawan banjir = (409 Ha/38.353Hax100%=1,07%).

Foto III.6 Pembangunan Senderan Sungai Sikenanga Kec. Plered



3. Foto III.7 Pemasangan Bronjong Kali Tersana Kec. Pabedilan



4. Foto III.8 Normalisasi Kali Sibanteng Kec. Jamblang

Sebelum	Sesudah
	



5. Foto III. 9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ciwado	
Sebelum	Sesudah



6. Foto III. 10 Normalisasi Sal.sek Srombyong Kec.Kapetakan	
Sebelum	Sesudah



Tabel III.12
Analisa faktor Pendorong, Penghambat dan Solusi
Sasaran 2

No.	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1.	Meningkatnya persentase Intensitas Tanam	1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 186 Tahun 2022 tentang Recana Tata Tanam, Rencana Penyediaan dan Pengaturan Air Irigasi Tahun 2023/2024 dan Jadwal Pengeringan Jaringan Irigasi Tahun 2024 2. Pelaksanaan Sosialisasi Rencana Tata Tanam 3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Komisi Irigasi	1. Kerusakan konstruksi pada jaringan irigasi 2. Adanya Sedimentasi 3. Sampah yang dibuang ke sungai atau saluran irigasi	1. Peningkatan kondisi dan fungsi jaringan irigasi 2. Melaksanakan normalisasi pada Sungai/saluran Pembuang dan saluran Irigasi 3. Melaksanakan pengawasan tata gilir air

1.3. Sasaran 3 :

Kinerja sasaran Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang diukur dengan indikator Ketaatan terhadap RTRW, indikator kinerja dan rumus perhitungan adalah sebagai berikut :

Tabel III.13
Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3

No.	Sasaran	Indikator	Rumus Perhitungan
1.	Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	$\frac{\text{Jumlah Realisasi kebijakan pembangunan}}{\text{Jumlah kebijakan pembangunan yang ada pada perda RTRW}} \times 100$

Tabel III.14
Target dan Realisasi Sasaran 3

No.	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian s.d 2024 terhadap target Renstra
				Target	Realisasi	Capaian		
	Ketaatan terhadap RTRW	16,67%	22,22%	33,33%	33,33% (6 Dok/ 18 Dok X 100%=33,33%)	100% (33,33%/ 33,33% X 100%)	33,33%	100%

Rencana tata ruang wilayah merupakan sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah, untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah, acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah, acuan lokasi investasi, acuan penyusunan rencana rinci tata ruang dan acuan dalam administrasi Kabupaten/ Kota, untuk mewujudkan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terus berupaya merealisasikan Dokuman yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang secara

berkelanjutan, ditahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah menyelesaikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 – 2044 dan melaksanakan penyusunan Rencana Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Cirebon terkait RDTR Mundu.

Analisis ketercapaian Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja Perencanaan,Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang adalah sebagai berikut :

- 1. Realisasi sebesar 33,33% dengan demikian prosentase capaian di tahun 2024 terhadap target sebesar 100% (realisasi terpenuhi)
- 2. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 11,11%.
- 3. Capaian realisasi pada tahun 2024 terhadap target akhir renstra 100% (realisasi terpenuhi).

Untuk mendukung pencapaian keberhasilan indikator kinerja sasaran 3 Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang didukung oleh keberhasilan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan sebagai berikut :

Tabel III.15
Capaian Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan terhadap Sasaran 3

Ns.	Program	Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		persentase pemenuhan dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	20%	20%	100,00
		1.1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase dokumen sistem bangunan yang tersedia	100%	100%	100,00
		1.1.1. Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase pemenuhan dokumen rencana rinci tata ruang dan ketaatan pemanfaatan ruang	82,56%	87,65%	106,17
		2.1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Prosentase tersedianya dokumen kebijakan perencanaan Tata Ruang	50%	50%	100,00

No.	Program	Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		2.1.1. Sub. Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		2.2.Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase aturan tata ruang yang tersosialisasikan	100%	100%	100,00
		2.2.1. Sub. Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		2.3.Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase tersedianya dokumen Pengawasan	100%	100%	100,00
		2.3.1. Sub. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	206 Dokumen	349 Dokumen	169,42

Capaian tersebut di dukung dari :

a. Capaian Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Indikator Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya yaitu persentase pemenuhan dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 20% terealisasi sebesar 20% dengan capaian 100% dari Target. Perhitungan realisasi dihitung dari Jumlah dokumen penataan bangunan dan lingkungannya yang disusun pada tahun berjalan dibagi rencana dokumen yang akan disusun selama lima tahun.

persentase pemenuhan dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan = (1 Dokumen/5 Dokumen x 100%=20%)

b. Capaian Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Indikator Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yaitu Persentase pemenuhan dokumen rencana rinci tata ruang dan ketaatan pemanfaatan ruang. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 82,56% terealisasi sebesar 87,65% dengan capaian 106,17 % dari Target. Perhitungan dihitung berdasarka realiasi jumlah kumulatif Dokumen materi teknis dan rinciannya ditambah jumlah realisasi dokumen informasi pemanfaatan ruang (advice Planning) = ((1/17)+349)/2 x 100%=87,65%

Foto III.11 Fasilitas Persetujuan Subtansi RTRW

	
Keterangan: Koordinasi Revisi RTRW Kabupaten Cirebon dengan Kemetrian ATR/BPN	Keterangan: Pembahasan Revisi RTRW Kabupaten Cirebon dengan DPRD Kabupaten Cirebon
	
Keterangan: Rapat Linsek Revisi RTRW Kabupaten Cirebon dengan Kemetrian ATR/BPN	Keterangan: Pembahasan Penyelamatan Lahan Sawah Dilindungi dengan Kemetrian ATR/BPN

Foto III.12 Fasilitas Persetujuan Subtansi RDTR

Tabel III.16
Analisa faktor Pendorong, Penghambat dan Solusi Sasaran 3

No.	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1.	Ketaatan terhadap RTRW	1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Adanya komitmen pimpinan dalam penyelesaian Dokumen Perencanaan Tata Ruang	1. Keterbatasan data dan informasi geospasial 2. Proses Penetapan Perda/Perkada tentang RTR (RTRW, RDTR dan RTBL) yang berjenjang sehingga tidak dapat diselesaikan hanya ditingkat daerah	1. Percepatan evaluasi dan pembahasan di provinsi. 2. Mempercepat penetapan Perda/Perkada tentang RTR (RTRW, RDTR dan RTBL) 3. Meningkatkan koordinasi dengan K/L dan sektor terkait 4. Usulan klinik Fasilitas Persetujuan Substansi ke Kementerian ATR/BPN

1.4. Sasaran 4 :

Kinerja sasaran Terciptanya pelayanan jasa konstruksi yang optimal diukur dengan indikator Persentase layanan informasi jasa konstruksi, indikator kinerja dan rumus perhitungan di gambarkan pada tabel halaman berikutnya :

Tabel III.17
Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan Sasaran 4

No.	Sasaran	Indikator	Rumus Perhitungan
1.	Terciptanya pelayanan jasa konstruksi yang optimal	Persentase layanan informasi jasa konstruksi	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Layanan Informasi}}{\text{Jumlah Layanan Informasi yang di rencanakan}} \times 100$

Tabel III.18
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 4

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 terhadap Target Akhir Renstra (%)
						Target	Realisasi	Capaian		
1	Terciptanya pelayanan jasa konstruksiyang optimal	Persentase layanan informasi jasa konstruksi	Prosen	70	85	100	100	100,00	100	100

Analisis ketercapaian Sasaran 4 : Terciptanya pelayanan jasa konstruksi yang optimal adalah sebagai berikut :

- 1. Realisasi sebesar 100 % dengan demikian prosentase capaian di tahun 2024 terhadap target sebesar 100% (realisasi terpenuhi)
- 2. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 15%.
- 3. Capaian realisasi pada tahun 2024 terhadap target akhir renstra 100% (realisasi terpenuhi).

Untuk mendukung pencapaian keberhasilan indikator kinerja sasaran 3 Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang didukung oleh keberhasilan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan sebagai berikut :

Tabel III.19
Capaian Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan terhadap Sasaran 4

No.	Program	Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		persentase meningkatnya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	100%	100%	100,00
		Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	100%	100,00
		Sub. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Lembaga	11 Lembaga	100,00
		Sub. Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	60 Orang	63 Orang	105,00
		Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%	100,00
		Sub. Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	200 Paket Pekerjaan	200 Paket Pekerjaan	100,00
		Sub. Kegiatan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	25 Lembaga	108 Lembaga	432,00

Capaian tersebut di dukung dari :

Capaian Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Indikator Program Pengembangan Jasa Konstruksi yaitu persentase persentase meningkatnya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100% dari Target. Perhitungan realisasi dihitung berdasarkan pada realisasi kegiatan yang dilaksanakan lingkup pengembangan jasa konstruksi melalui pelaksanaan peningkatan kapasitas

Tenaga konstruksi melalui Pembinaan dan Pelatihan serta pengawasan tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Foto III.13 Pelatihan Tenaga Terampil



Foto III.14 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas



Foto III.15 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi



Tabel III.20
Analisa faktor Pendorong, Penghambat dan Solusi Sasaran 4

No.	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1.	Persentase layanan informasi jasa konstruksi	1. Adanya Tim Koordinasi Jasa Konstruksi 2. Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Daerah (SIJAKDA) 3. pembagian peran berupa tanggung jawab dan kewenangan antara	1. kurannya Jumlah tenaga Kerja Konstruksi bersertifikat 2. Kurang tertibnya pelaksana Jasa Konstruksi	1. Penyelenggaraan Pembinaan kelembagaan Jasa Konstruksi 2. Pengawasan Jasa Konstruksi 3. Penyelenggaraan Pelaitihan dan

No.	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
		Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi	3. Kurangnya penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja Konstruksi 4. Data tenaga kerja konstruksi bersertifikat yang diperoleh LPJK sulit didapatkan dan tidak lengkap	sertifikasi tenaga konstruksi yang berkelanjutan 4. Pemutakhiran dan Pengembangan Aplikasi SIJAKDA

1.5. Sasaran 5 :

Kinerja sasaran Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan diukur dengan indikator Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD; indikator kinerja dan rumus perhitungan adalah sebagai berikut :

Tabel III.21

Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan Sasaran 5

No.	Sasaran	Indikator	Rumus Perhitungan
1.	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD	Hasil Penilaian LKIP SKPD oleh Inspektorat

Kinerja sasaran Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan, dapat tergambarka pada halaman berikutnya :

Tabel III.22

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 5

No.	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian s.d 2024 terhadap target Renstra %
				Target	Realisasi	Capaian		
1.	Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD	63,73 Point	73,70 Point	75 Point	74,50 Point	99,33% (74,50 75 X 100%)=99,33%	75 Point	99,33%

Penyusunan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja berupa informasi kinerja berdasarkan perencanaan kinerja strategis dan perencanaan kinerja tahunan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja, laporan ini menggambarkan keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja sebagai bahan evaluasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya, Dalam meningkatkan realisasi sasaran Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terus berupaya menampilkan laporan secara akuntabel dan terukur.

Analisis ketercapaian Sasaran 5 : Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan adalah sebagai berikut :

- 1.Realisasi sebesar 99,33% dengan demikian prosentase capaian di tahun 2024 terhadap target sebesar 99,33% (belum terpenuhi)

2. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,80%.
3. Capaian realisasi pada tahun 2024 terhadap target akhir renstra 99,33% (belum terpenuhi).

Untuk mendukung pencapaian keberhasilan indikator kinerja sasaran 5 Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan didukung oleh keberhasilan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan pada tabel pada halaman berikutnya :

Tabel III.23
Capaian Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan terhadap Sasaran 5

No.	Program	Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya Kebutuhan dasar operasional Dinas	100%	100%	100,00
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Laporan Kinerja Dinas	100%	100%	100,00
		Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00
		Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	18 Laporan	100,00
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Terpenuhinya Dokumen Realisasi Anggaran Dinas	100%	100%	100,00
		Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2951 Orang/ Bulan	2627 Orang/ Bulan	89,02
		Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00
		Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	10 Laporan	100,00
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terjaminya Barang Milik Daerah	100%	100%	100,00

No.	Program	Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		Sub. Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	1,00
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Dinas	100%	100%	100,00
		Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00
		Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00
		Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00
		Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00
		Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen	100,00
		Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00
		Sub. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100,00
		Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	120 Laporan	100,00
		Sub. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.000 Dokumen	11.700 Dokumen	97,50
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penunjang Operasional Dinas	100%	100%	100,00
		Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terjaganya Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas	100%	100%	100,00
		Sub. Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	178 Unit	178 Unit	100,00
		Sub. Kegiatan Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	164 Unit	24 Unit	14,63
		Sub. Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	35 Unit	35 Unit	100,00

No.	Program	Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		Sub. Kegiatan Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	17 Unit	100,00
		Sub. Kegiatan Sub. Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	230 Unit	91 Unit	39,57
		Sub. Kegiatan Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	14 Unit	82,35
		Sub. Kegiatan Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	183 Unit	106 Unit	57,92

Capaian tersebut di dukung dari :

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu Terpenuhinya Kebutuhan dasar operasional Dinas. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100% dari Target. Perhitungan realisasi dihitung berdasarkan pada realisasi kegiatan yang dilaksanakan lingkup :

1. Ketersediaan Dokumen Perencanaan Dinas dan Anggaran Dinas;
2. Ketersediaan Dokumen Laporan Kinerja dan Anggaran;
3. Peningkatan sarana dan prasarana kerja;
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Penyediaan Penunjang pelaksanaan kegiatan.

Foto III.16 Forum OPD



Foto III.17 Rapat Evaluasi



Foto III.18 Rapat Persiapan Penyusunan Rencana Kerja



Tabel III.24
Analisa faktor Pendorong,Penghambat dan Solusi Sasaran 5

No.	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1.	Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD	1. Adanya sistem monitoring Evaluasi Kinerja (Simonek) 2. Sarana dan prasarana yang memadai	1. Penyampaian data yang kurang tepat waktu 2. Kurang optimalnya penyandingan capaian kinerja dengan Dinas di atasnya yang penyusunannya bersamaan dengan Daerah Kabupaten/Kota	1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi secara berkala 2. Peningkatan Koordinasi dengan Dinas Provinsi

1.6. Sasaran 6 :

Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung diukur dengan indikator Prosentase penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung, indikator kinerja dan rumus perhitungan adalah sebagai berikut :

Tabel III.25
Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan Sasaran 6

No.	Sasaran	Indikator	Rumus Perhitungan
1.	Meningkatnya Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	Prosentase penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	$\frac{\text{Jumlah Kumulatif capaian Presentase penduduk berakses air minum, Prosentase bangunan Penampung Sampah Yang Terbangun, Persentase Rumah Tinggal bersanitasi, dan Rasio bangunan ber/MB per satuan bangunan}}{4} \times 100$

Tabel III.26
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 6

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		2024		Capaian	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 terhadap Target Akhir Renstra (%)
			2022	2023	Target	Realisasi			
1	Meningkatnya Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Airlimbah dan Bangunan Gedung	Prosentase penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	45,40%	47,42%	64,01%	47,31% ((92,31%+5,31%+89,62%+2%)/4) X100%=47,31%	73,91% (47,31%/64,01%)= 73,91%	64,01%	73,91%

Analisis ketercapaian Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Airlimbah dan Bangunan Gedung adalah sebagai berikut :

- 1. Realisasi sebesar 47,31% dengan demikian prosentase capaian di tahun 2024 terhadap target sebesar 73,91% (belum terpenuhi)
- 2. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,11%.
- 3. Capaian realisasi pada tahun 2024 terhadap target akhir renstra 73,91% (belum terpenuhi).

Untuk mendukung pecapaian keberhasilan indikator kinerja sasaran 6 Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan didukung oleh keberhasilan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan sebagai berikut :

Tabel III.27
Capaian Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan terhadap Sasaran 6

No.	Program	Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase penduduk berakses air minum	73%	92,31%	127%
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Layanan SPAM Sambungan Rumah di Tahun n	0,38%	0,33%	87%
		Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

No.	Program	Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		Sub. Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	0,15 Liter/Detik	0,06 Liter/Detik	40%
		Sub. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	20 Desa	20 Desa	100%
		Sub. Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0,31 Liter/Detik	0,54 Liter/Detik	174%
	ROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Prosentase bangunan Penampung Sampah Yang Terbangun	100%	5,31%	5%
		Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Bangunan Penampungan Sampah di tahun n	25%	25%	100%
		Sub. Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	24.179 Ton/hari	338,83 Ton/hari	1,40%
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Prosentase cakupan akses air limbah domestik	81,06%	89,52%	111%
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Layanan SPALD Rumah Tangga di Tahun n	49,34%	0,13%	0,26%
		Sub. Kegiatan Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	190.98 M ³ /Hari	2,98 M ³ /Hari	2%
		Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan	2%	2%	100%
		Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Prosentase Layanan PBG yang terlayani	100%	100%	100%
		Sub. Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	48 Bangunan	48 Bangunan	100%

No.	Program	Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		Sub. Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	20 Bantuan Teknis	32 Bantuan Teknis	63%
		Sub. Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	13 Dokumen	6 Dokumen	46%
		Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	3 Orang	100 Orang	3333%
		Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung PBG , Sertifikat Laik Fungsi SLF, Gedung SBKBG , Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung RTB , Tim Profesi Ahli TPA , Tim Penilai Teknis TPT , Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	110 Dokumen	467 Dokumen	425%

Capaian tersebut di dukung dari :

a. Capaian Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Indikator program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yaitu Persentase penduduk berakses air minum. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 73% terealisasi sebesar 92,31% dengan capaian 126,45% dari Target. Perhitungan realiasi dihitung dari Jumlah Kumulatif Sambungan Rumah sampai dengan Tahun 2024 dibagi Jumlah KK Tahun 2024 = (773.934 SR/ 838.411 KK)x100% = 92,31%

Upaya pengembangan dan peningkatan cakupan layanan Air Minum di Kabupaten Cirebon telah melaksanakan Pembangunan Jaringan Perpipaan pada tahun 2024 sejumlah 1.906 SR dan pembangunan toren 2 Unit dan Pengembangan Jaringan Pipa Perkotaan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Pembangunan Jaringan Distribusi di Kecamatan Gunungjati, Cakupan Layanan Air Minum dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel III.28 Rekapitulasi SPAM

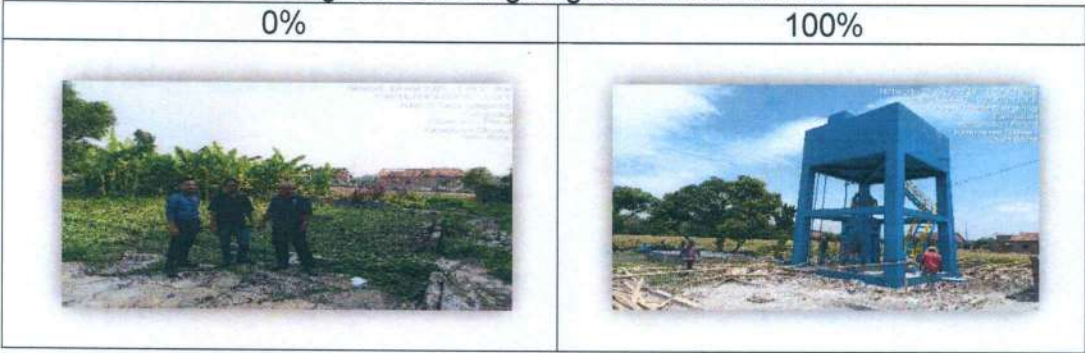
No.	Kecamatan	Jumlah SR S.D Tahun 2023	Pelaksanaan Tahun 2024	Jumlah SR S.D Tahun 2024
1	Losari	4.325	125	4.450
2	Pabedilan	1.403		1.403
3	Ciledug	810		810
4	Pasaleman	3.296		3.296
5	Waled	7.330	95	7.425
6	Babakan	3.442		3.442
7	Pabuaran	595		595
8	Karangwareng	10.295		10.295
9	Gebang	2.672		2.672
10	Karangsembung	77		77
11	Lemahabang	5.218	83	5.301
12	Susukan Lebak	5.921		5.921
13	Sedong	29.125	125	29.250
14	Greged	26.778	301	27.079
15	Astanajapura	2.764	188	2.952
16	Pangenan	2.024		2.024
17	Mundu	9.584	393	9.977
18	Beber	39.653	130	39.783
19	Talun	47.852		47.852
20	Sumber	34.178	273	34.451
21	Dukupuntang	23.776		23.776
22	Palimanan	8.675		8.675
23	Plumbon	4.050		4.050
24	Weru	0		0
25	Kedawung	400		400
26	Gunungjati	19.081		19.081
27	Kapetakan	28.044		28.044
28	Suranenggala	9.760		9.760
29	Jamblang	6.109		6.109
30	Klangerian	6.490		6.490
31	Arjawinangun	35.638	90	35.728
32	Panguragan	35.565		35.565
33	Ciwaringin	12.011		12.011
34	Susukan	7.179		7.179
35	Gegesik	37.060		37.060
36	Kaliwedi	12.396		12.396
37	Depok	6.122		6.122
38	Gempol	18.215		18.215
39	Plered	500	103	603
40	Tengah Tani	260		260
41	Non Perumahan	6		6
42	Perum Puri Cirebon Lestari	165		165
43	Puri Taman Sumber Indah	172		172
44	Perum The Garden	264		264
45	Perum Mega Residence	19		19

No.	Kecamatan	Jumlah SR S.D Tahun 2023	Pelaksanaan Tahun 2024	Jumlah SR S.D Tahun 2024
46	PT Toyamelindo	1		1
47	Perum Greenland	86		86
48	Rivera	22		22
49	Dinkes	222.578		222.578
50	PDAM	40.042		40.042
Jumlah		772.028	1.906	773.934

Foto III.19 Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) / Penambahan Sumur Dalam Terlindungi / Broncaptering di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu



Foto III.20 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) / Broncaptering / Sumur Dalam Terlindungi di Desa Cangkring Kecamatan Plered



b. Capaian Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Indikator Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional yaitu Prosentase bangunan Penampung Sampah Yang Terbangun. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% terealisasi sebesar 5,31% dengan capaian 5,31% dari Target. Perhitungan realiasi dihitung dari Jumlah Kumulatif bangunan penampungan yang dibangun sampai dengan Tahun 2024 dibagi rencana bangunan penampungan sampah selama 3 Tahun, dengan perhitungan = (11 Bangunan/ 207 Bangunan)x100% = 5,31%, ditahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melaksanakan perbaikan jalan menuju

TPA Kubangdeleg sepanjang 526,5 Meter konstruksi yang dilaksanakan hanya perkerasan badan jalan

Foto III.21 Perbaikan Jalan menuju TPAS Kubangdeleg



c. Capaian Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Indikator program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah yaitu Prosentase cakupan akses air limbah domestik. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 81,06% terealisasi sebesar 89,62% dengan capaian 110,56% dari Target. Perhitungan realiasi dihitung dari Jumlah Kumulatif Sambungan Rumah sampai dengan Tahun 2024 dibagi Jumlah Rumah Tahun 2024 = $(690.232 \text{ SR} / 770.160 \text{ Rumah}) \times 100\% = 89,62\%$

Upaya pengembangan dan peningkatan cakupan cakupan akses air limbah domestik di Kabupaten Cirebon telah melaksanakan Pembangunan Tangki Septik Komunal pada tahun 2024 sejumlah 1.552 SR, Cakupan akses air limbah domestik dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel III.29 Cakupan akses air limbah domestik

NO	KECAMATAN	Sambungan Akses Air Limbah Domestik s.d Tahun 2023	Pelaksanaan Tahun 2024	Sambungan Akses Air Limbah Domestik s.d Tahun 2024
1	Losari	21.052		21.052
2	Pabedilan	14.701		14.701
3	Ciledug	15.893	286	16.179
4	Pasaleman	15.255		15.255
5	Waled	15.027		15.027
6	Babakan	25.185		25.185
7	Pabuaran	12.410		12.410
8	Karangwareng	24.338		24.338
9	Gebang	13.580		13.580
10	Karang Sembung	12.768		12.768
11	Lemahabang	17.523		17.523
12	Susukan Lebak	10.869		10.869

NO	KECAMATAN	Sambungan Akses Air Limbah Domestik s.d Tahun 2023	Pelaksanaan Tahun 2024	Sambungan Akses Air Limbah Domestik s.d Tahun 2024
13	Sedong	14.007		14.007
14	Greged	11.106		11.106
15	Astanajapura	22.804	61	22.865
16	Pangenan	21.250		21.250
17	Mundu	21.078	226	21.304
18	Beber	18.780		18.780
19	Talun	15.217	35	15.252
20	Sumber	17.145	571	17.716
21	Dukupuntang	13.911		13.911
22	Palimanan	12.824		12.824
23	Plumbon	16.762		16.762
24	Weru	16.179	61	16.240
25	Kedawung	15.684		15.684
26	Gunungjati	24.802		24.802
27	Kapetakan	19.928		19.928
28	Suranenggala	15.233		15.233
29	Jamblang	16.376	92	16.468
30	Klangenan	14.200		14.200
31	Arjawinangun	19.742		19.742
32	Panguragan	22.052	35	22.087
33	Ciwaringin	17.052		17.052
34	Susukan	14.100		14.100
35	Gegesik	25.437		25.437
36	Kaliwedi	23.575		23.575
37	Depok	16.883		16.883
38	Gempol	15.465		15.465
39	Plered	14.369	185	14.554
40	Tengahtani	14.118		14.118
JUMLAH		688.680	1.552	690.232

Foto III.22 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Pamengkang Kecamatan Mundu



Foto III.23 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Damarguna Kecamatan Ciledug



d. Capaian Program Penataan Bangunan Gedung

Indikator program Penataan Bangunan Gedung yaitu Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 2 % terealisasi sebesar 2% dengan capaian 100% dari Target.

Upaya Penataan Bangunan Gedung di Kabupaten Cirebon telah menerbitkan persetujuan Bangunan Gedung pada tahun 2024 sejumlah 403 Dokumen dan Sertifikat Layak Fungsi Bangunan sejumlah 64 Dokumen.

Foto III.24 Layanan Bangunan Gedung



Tabel III.30
Analisa faktor Pendorong, Penghambat dan Solusi Sasaran 6

No.	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
	Meningkatnya Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	1. Adanya kebijakan tentang penerapan SPM Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat 2. Peraturan Bupati Cirebon nomor 2 tahun 2024	1. Ketersediaan lahan 2. Sumber air yang kurang dari kebutuhan 3. Belum adanya bangunan pengelolaan limbah terpadu dan sarana pendukungnya 4. Belum memiliki RDTR dan RTBL sebagai dasar kejelasan wilayah investasi untuk wilayah	1. Percepatan Proses pengadaan lahan 2. Pelaksanaan Pengembangan SPAM berdasarkan data potensi air yang ada 3. Percepatan Pembangunan IPLT 4. Peningkatan koordinasi secara intens dengan pemerintah pusat

No.	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
		tentang Persetujuan Bangunan Gedung 3. Program prioritas dalam penanganan Sampah di Kabupaten Cirebon	industri, perdagangan, jasa, permukiman, permukiman dan usaha lainnya 5. Persyaratan umum berupa dokumen lingkungan untuk PMA menjadi kewenangan Pusat 6. Permasalahan pada sistem PBG jika terjadi kendala harus menunggu dari pusat, karena pengelolaan sistemnya ada pemerintah pusat 7. Masihnya rendahnya pengetahuan terkait PBG dan persyaratan dokumen PBG 8. Kurangnya SDM dalam pengawasan, monitoring dan operasi SIM BG	5. Percepatan penyusunan RDTR dan RTBL 6. Permohonan delegasi tugas ke Tingkat Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten 7. Peningkatan Sosialisasi terkait PBG 8. Penambahan Sumber Daya Manusia

C. Efisiensi Anggaran dan Efektifitas Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 yang di alokasikan untuk pedanaan program/kegiatan dan sub. Kegiatan dalam pencapaian 6 sasaran disajikan pada tabel halaman berikutnya :

Tabel III.31 Efisiensi dan Efektifitas per Sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja		Capaian Kinerja	No.	Keuangan				Efisiensi	
			Target	Realisasi			Program	Pagu Rp.	Realisasi		Rp.	%
									Rp.	%		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten	Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap)	87%	84,91%	97,60%	1	Program Penyelenggaraan Jalan	175.664.475.100	172.153.452.060	98,00	3.511.023.040	2,00
						2	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	9.909.251.100	8.756.326.580	88,37	1.152.924.520	11,63
		Capaian dari Indikator			97,60%	Total Per Sasaran		185.573.726.200	180.909.778.640	97,49	4.663.947.560	2,51
Tingkat Efektifitas					100,11%							
2	Terpenuhinya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air secara Optimal	Meningkatnya persentase Intensitas Tanam	86,67%	91,33%	105,38%	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	60.155.873.900	58.276.431.789	96,88	1.879.442.111	3,12
		Capaian Indikator			105,38%	Total Per Sasaran		60.155.873.900	58.276.431.789	96,88	1.879.442.111	3,12
Tingkat Efektifitas					108,77%							
3	Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	33,33%	33,33%	100,00%	1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.617.076.700	2.503.985.740	95,68	113.090.960	4,32
						2	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	224.848.000	224.425.490	99,81	422.510	0,19
		Capaian Indikator			105,38%	Total Per Sasaran		2.841.924.700	2.728.411.230	96,01	113.513.470	3,99
Tingkat Efektifitas					109,76%							
4	Terciptanya pelayanan jasa konstruksi yang optimal	Persentase layanan informasi jasa konstruksi	100%	100%	100%	1	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	502.595.500	496.265.680	98,74	6.329.820	1,26
		Capaian Indikator			100	Total Per Sasaran		502.595.500	496.265.680	98,74	6.329.820	1,26
Tingkat Efektifitas					101,28%							

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Meningkatnya kinerja aparaturnya dan kualitas pelayanan	Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD	75%	74,50%	99,33%	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.723.577.260	29.667.460.723	96,56	1.056.116.537	3,44
		Capaian Indikator			99,33%	Total Per Sasaran		30.723.577.260	29.667.460.723	96,56	1.056.116.537	3,44
Tingkat Efektifitas					103,08%							
6	Meningkatnya Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	Prosentase penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	64,01%	47,31%	73,91%	1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	22.109.713.842	21.413.653.950	96,85	696.059.892	3,15
						2	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	200.000.000	198.806.000	99,40	1.194.000	0,60
						3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	11.696.696.000	11.648.414.600	99,59	48.281.400	0,41
						4	Program Penataan Bangunan Dan Gedung	9.995.637.100	9.561.553.385	95,66	434.083.715	4,34
		Capaian Indikator			73,91%	Total Per Sasaran		44.002.046.942	42.822.427.935	97,32	1.179.619.007	2,68
Tingkat Efektifitas					75,95%							
						Total Keseluruhan		323.799.744.502	314.900.775.997	97,25	8.898.968.505	2,75

Berdasarkan tabel III.31 pada halaman sebelumnya, capaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada Tahun 2024 bervariasi, terdapat 1 Sasaran yang realisasinya melebihi target yaitu Sasaran Terpenuhinya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air secara Optimal, 2 Sasaran yang realisasi memenuhi atau sesuai target yaitu Sasaran Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang dan Sasaran Terciptanya pelayanan jasa konstruksi yang optimal, dan 3 Sasaran yang belum memenuhi target yaitu Sasaran Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten, Sasaran Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan dan Sasaran Meningkatnya Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung, dengan realisasi anggaran dari total belanja Program, Kegiatan, dan Sub. Kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran sebesar Rp. 323.799.744.502,- dengan realisasi Rp. 314.900.775.997,- atau 97,25% sehingga dapat disampaikan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien.

Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.898.968.505,- atau 2,75% yang bersumber dari :

- Sisa dari pengadaan barang dan jasa
- Sisa dari Belanja Pegawai
- Adanya kegiatan konstruksi yang belum terbayarkan di karenakan adanya permasalahan perekaman pada sistem SIPD pada tahapan perubahan anggaran

D. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

1. Pemanfaatan teknologi melalui media sosial dan penyimpanan cloud (misalnya layanan Google drive, spreadsheet dan Whatsapp) untuk mengefektifkan dan efesienkan penyampaian data, informasi serta komunikasi.
2. Aplikasi SIJAKDA merupakan aplikasi yang dipergunakan untuk kebutuhan Transparansi dan Peningkatan kualitas Konstruksi Kabupaten Cirebon.

BAB IV PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pada Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten dari target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebanyak enam sasaran dengan enam indikator yang ingin dicapai, secara rinci pancapaian sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ❖ Terdapat 1 Sasaran yang melebihi target yaitu Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA dengan Indikator Meningkatnya persentase Intensitas Tanam dengan capaian 105,38 %;
- ❖ Terdapat 2 sasaran sesuai dengan target yaitu sasaran Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang dengan indikator Ketaatan terhadap RTRW dengan capaian 100% dan Sasaran Terciptanya pelayanan jasa konstruksi yang optimal dengan indikator Persentase layanan informasi jasa konstruksi dengan capaian 100%;
- ❖ Terdapat 3 sasaran yang belum memenuhi target yaitu sasaran Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten indikator Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap) dengan Capaian 97,60%, sasaran Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan dengan indikator Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD dengan capaian 99,33% dan sasaran Meningkatnya Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung dengan indikator Prosentase penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung dengan capaian 75,12%.

IV.2. Hambatan

1. Penananganan jalan belum berbanding lurus dengan kebutuhan penanganan jalan terutama Pemeliharaan Berkala dan Rutin Jalan;
2. Belum seluruhnya ruas jalan memiliki drainase Jalan sehingga dapat mempercepat kerusakan jalan akibat adanya genangan air pada badan jalan
3. Beban Kendaraan yang melebihi kelas Jalan Kabupaten
4. Sampah yang dibuang ke Saluran Irigasi, Sungai dan saluran pembuang;
5. Kerusakan konstruksi pada jaringan irigasi;
6. Proses Penetapan Perda/Perkada tentang RTR (RTRW, RDTR dan RTBL) yang berjenjang sehingga tidak dapat diselesaikan hanya ditingkat daerah
7. kurangnya Jumlah tenaga Kerja Konstruksi bersertifikat
8. Ketersedian lahan dalam Pembangunan infrastruktur;
9. Kurangnya ketersediaan sumber air;

10. Belum memiliki RDTR dan RTBL sebagai dasar kejelasan wilayah investasi untuk wilayah industri, perdagangan, jasa, permukiman, permukiman dan usaha lainnya
11. Persyaratan umum berupa dokumen lingkungan untuk PMA menjadi kewenangan Pusat
12. Kurangnya Sumber Daya Manusia.

IV.3 Faktor Kunci Keberhasilan

1. Adanya program prioritas Pembangunan Daerah dalam hal infrastruktur Jalan;
2. Dukungan Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan;
3. Regulasi berkaitan dengan Rencana Masa Tanam dan tata gilir air;
4. komitmen pimpinan dalam penyelesaian Dokumen Perencanaan Tata Ruang
5. Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Daerah (SIJAKDA)
6. Adanya Regulasi yang jelas dalam penyelenggaraan persetujuan bangunan Gedung;
7. Adanya sistem monitoring Evaluasi Kinerja (Simonek);
8. Penyusunan data prioritas penanganan infrastruktur dan penataan Rung;
9. Sarana dan prasarana yang memadai dalam pencapaian kinerja;

IV. 4 Langkah Perbaikan Kinerja

Beberapa langkah kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon :

1. Penanganan jalan dilakukan secara berkelanjutan melalui skala prioritas penanganan;
2. Penggunaan konstruksi rigid pavement terhadap ruas jalan yang lapisan tanahnya labil dan ruas jalan yang tidak memiliki sistem Drainase;
3. Pembangunan saluran jalan secara berkesinambungan;
4. Pelaksanaan koordinasi lintas Stakeholder terhadap fungsi Jalan;
5. Peningkatan intensitas penanganan normalisasi jaringan irigasi, sungai dan saluran pembuang dengan dukungan sumber daya dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat.
6. Peningkatan kondisi dan fungsi jaringan irigasi;
7. Meningkatkan koordinasi dengan K/L dan sektor terkait;
8. Percepatan Proses pengadaan lahan
9. Pelaksanaan Pengembangan SPAM berdasarkan data potensi air yang ada
10. Percepatan penyusunan RDTR dan RTBL
11. Permohonan pendelegasian tugas ke Tingkat Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten
12. Penambahan Sumber Daya Manusia

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2024, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2024 kepada pihak-pihak terkait dan hal tersebut sebagai bahan untuk selalu meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

LAMPIRAN

Lampiran 1 PERJANJIAN KINERJA AWAL DAN PERUBAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. IWAN RIZKI
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. IMRON, M.Ag
Jabatan : Bupati Cirebon

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2024

Pihak Kedua,

Drs. H. IMRON, M.Ag

Pihak Kesatu,

Ir. IWAN RIZKI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660223 199303 1 004



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.1.	Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang baik berbasis Penataan Ruang melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang baik	Indeks Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Baik	Jumlah Kumulatif persentase Kondisi Jalan Mantap, Kondisi Jaringan Irigasi Baik dan Persentase kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman dibagi 3	Non Kumulatif	Meningkat	survey	80.9 Prosen
4.1.01.	Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten	Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap)	$\frac{\text{Jumlah Kondisi Jalan Baik dan Sedang}}{\text{Total Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Survey kondisi jalan	87 Prosen
4.1.02.	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA	Meningkatnya persentase intensitas Tanam	$\frac{\text{Realisasi Tanam I, II dan III}}{300} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	-	86.67 Prosen
4.1.03.	Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Realisasi kebijakan pembangunan/ Jumlah kebijakan pembangunan yang ada pada perda RTRW X 100	Non Kumulatif	Meningkat	Jumlah Realisasi perda pada tahun berjalan	33.33 Prosen
4.1.04.	Terciptanya pelayanan jasa konstruksi yang optimal	Persentase layanan informasi jasa konstruksi	Jumlah Realisasi Layanan Informasi/ Jumlah Layanan Informasi yang di rencanakan x 100	Non Kumulatif	Meningkat	-	100 Prosen
4.1.05.	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD	Hasil Penilaian LKIP SKPD oleh Inspektorat	Non Kumulatif	Meningkat	-	75 Poin
4.1.06.	Meningkatnya Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	Persentase penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	Jumlah Kumulatif capaian Presensate penduduk berakses air minum, Persentase bangunan Penampung Sampah Yang Terbangun Persentase Rumah Tinggal bersanitasi, dan Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan dibagi 4	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Bangunan Gedung dan sanitasi Perumahan	64.01 Prosen

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
4.1.01.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	8.909.251.100,00	Sumber Dana: BPHTB, DTU-DAU, BPHTB, DTU-DAU, PBHPKB-jalan
4.1.01.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	168.601.975.100,00	Sumber Dana: BPHTB, DAK Fisik B Jalan Pragsn-jln, DTU-DAU, PBHPKB-jalan, BPHTB, DTU-DAU, DTU-DAU, PBHPKB-jalan, PBHPKB-jalan
4.1.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	46.037.240.200,00	Sumber Dana: BPHTB, DAK Fisik B.Irigasi Pen, DTU-DAU, BPHTB, DAK Fisik B.Irigasi Pen, DTU-DAU, PBHPKB-jalan, BPHTB, DTU-DAU, PBHPKB-jalan, BPHTB, PBHPKB-jalan, DTU-DAU, PBHPKB-jalan
4.1.03.09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	224.848.000,00	Sumber Dana: BPHTB, DTU-DAU
4.1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.617.076.700,00	Sumber Dana: BPHTB, DTU-DAU
4.1.04.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	502.595.500,00	Sumber Dana: BPHTB, DTU-DAU, DTU-DAU
4.1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.105.398.260,00	Sumber Dana: BPHTB, BPHTB, DTU-DAU, BPHTB, DTU-DAU, PBHPKB-jalan, BPHTB, Pjk Pen jln, DTU-DAU, PAD

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
4.1.06.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	17.897.213.842,00	Sumber Dana: BPHTB, DTU-DAU, BPHTB, D"U-DAU, P3HPKB-jalan, DAK Fisik B Air Minum Pen
4.1.06.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	800.936.000,00	Sumber Dana: BPHTB, DTU-DAU, BPHTB, D"U-DAU, P3HPKB-jalan
4.1.06.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9.083.137.100,00	Sumber Dana: BPHTB, DTU-DAU, DPHTD, D"U-DAU, P3BP2
J U M L A H		283.779.671.802,00	



Drs. H. IMRON, M.Ag



Sumber, Januari 2024
Pihak Kesatu
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang,

Ir. IWAN RIZKI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660223 199303 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. IWAN RIZKI
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : WAHYU MIJAYA
Jabatan : Pj. Bupati Cirebon

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2024


WAHYU MIJAYA
Pj. Bupati Cirebon


IR. IWAN RIZKI
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
NIP. 19660223 199303 1 004

Perkin Perubahan: 1.03.01, Desain RAB
S:\RAB\1.03.01\0000000000_00_10



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Setelah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.1	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur Pekerjaan Umum yang baik berbasis Peraturan Ruang melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang baik	Indeks Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Baik	persentase kondisi persentase kondisi jalan Mantap, Kondisi jaringan Irigasi Baik dan Persentase kualitas sarana dan prasarana peternakan dan perikanan dibagi 3	Non Kumulatif	Meningkat	Survey	80,5 Prosen	80,9 Prosen
4.1.01	Meningkatnya Kondisi jaringan jalan Kabupaten	Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap)	$\frac{\text{Jumlah Kondisi Jalan Baik dan Sedang}}{\text{Total Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Survey kondisi jalan	87 Prosen	87 Prosen
4.1.02	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA	Meningkatnya persentase intensitas Teras	$\frac{\text{Realisasi Teras I, II dan III}}{300} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	-	86,67 Prosen	86,67 Prosen
4.1.03	Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	$\frac{\text{Jumlah Realisasi kebijakan pembangunan Jumlah kebijakan pembangunan yang ada pada perda RTRW}}{100} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Jumlah Realisasi perda pada tahun berjalan	33,33 Prosen	33,33 Prosen
4.1.04	Terciptanya pelayanan jasa konstruksi yang optimal	Persentase layanan informasi jasa konstruksi	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Layanan Informasi Jumlah Layanan informasi yang di rencanakan}}{100} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	-	100 Prosen	100 Prosen
4.1.05	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Nilai hasil Evaluasi URP SGPD	Hasil Penilaian URP SGPD oleh Inspektaris	Non Kumulatif	Meningkat	-	75 Poin	75 Poin
4.1.06	Meningkatnya Kualitas penyediaan sistem air minum, Pemasokan, Air limbah dan Bangunan Gedung	Persentase penyediaan sistem air minum, Pemasokan, Air limbah dan Bangunan Gedung	$\frac{\text{Jumlah Kumulatif capaian Provisiade penduduk berakses air minum, Persentase bangunan Pemungut Sampah Yang Terbangun Persentase Rumah Tinggal bersantasi, dan Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan dibagi 4}}{4}$	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Bangunan Gedung dan sanitasi Permukiman	84,81 Prosen	84,81 Prosen

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Setelah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.1.01.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	9.989.251.300,00	9.989.251.300,00	Sumber Dana: BPHB, DTU-DAU, Pendapatan Bagi Hasil-PMD
4.1.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	168.681.975.300,00	175.684.475.300,00	Sumber Dana: BPHB, DTU-DAU, Pendapatan Bagi Hasil-PMD
4.1.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	46.637.248.300,00	90.155.873.900,00	Sumber Dana: DTU-DAU
4.1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	224.848.000,00	224.848.000,00	Sumber Dana: BPHB, DTU-DAU
4.1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.417.676.700,00	2.417.676.700,00	Sumber Dana: BPHB, DTU-DAU
4.1.04.11	PROGRAM PEREMBANGAN JASA KONSTRUKSI	582.595.500,00	582.595.500,00	Sumber Dana: BPHB, DTU-DAU
4.1.05.01	PROGRAM PENURUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.185.398.200,00	30.723.577.200,00	Sumber Dana: DTU-DAU, PMD

Lampiran Perkin Perubahan: 1.03.01 - Eselon II
s:\pwork_cirebonkab.go.id

Hal: 1 / 2

R

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.1.06.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	17.867.213.842,93	22.100.713.842,93	Sumber Dana: BPHTB, DTU-DAG, Pendapatan Bagi Hasil-PKB
4.1.06.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERAIRAN REGIONAL	0,00	200.000.000,00	Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil-PKB
4.1.06.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	800.936.000,00	11.606.606.000,00	Sumber Dana: BPHTB, DAK Fisik, S. Sanitasi Pem. DTU-DAG, Pendapatan Bagi Hasil-PKB
4.1.06.99	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9.883.137.100,00	9.895.637.100,00	Sumber Dana: BPHTB, DTU-DAG, APBDP, Pendapatan Bagi Hasil-PKB
J U M L A H		288.779.671.802,00	323.799.744.902,00	


 Bupati Cirebon
 WAHYU MIJAYA

Cirebon, Oktober 2024
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

 H. IMAN RIZKI
 Pejabat Utama Madya
 NIP. 19662231993031004

Lampiran 2 RENCANA AKSI AWAL, RENCANA AKSI PERUBAHAN DAN REALISASI RENCANA AKSI
RENCANA AKSI AWAL

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024													
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG									
SASARAN STRATEGIS					INDIKATOR KINERJA					TARGET			
1	Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten				Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap)					TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
													87%
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV					TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
1	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Jaringan Jalan Kabupaten dan Pembangunan Jalan Baru	√	√	√	√		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			1.323.826.380	3.063.494.750	3.679.438.220	842.491.750
								Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.323.826.380	3.063.494.750	3.679.438.220	842.491.750
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	11.142.000	10.554.000	58.034.000	9.966.000
						Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.312.864.380	3.052.940.750	3.621.404.220	832.525.750
										28.988.577.895	67.357.144.155	59.274.664.025	12.981.589.025
								Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		28.988.577.895	67.357.144.155	59.274.664.025	12.981.589.025
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	53.920.000	156.960.000	187.770.000	49.830.000
						Jumlah Jembatan yang Diganti			Penggantian Jembatan	624.900.000	1.527.250.000	1.755.850.000	392.000.000
						Panjang Jalan yang Direkonstruksi			Rekonstruksi Jalan	22.196.140.985	52.319.122.765	43.857.506.025	10.947.319.025
						Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala			Pemeliharaan Berkala Jalan	4.535.209.660	10.510.799.640	6.752.417.000	1.461.532.000
						Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi			Rehabilitasi Jembatan	-	96.000.000	402.000.000	-
						Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	22.284.000	71.633.000	215.543.000	19.932.000
						Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin			Pemeliharaan Rutin Jalan	1.554.123.250	2.673.378.750	6.103.578.000	110.976.000
Jumlah										30.312.404.275	70.429.638.905	82.954.102.245	13.824.086.775
SASARAN STRATEGIS					INDIKATOR KINERJA					TARGET			
2	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA				Meningkatnya persentase IntensitasTanam					TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
										33%	55%	70%	86,67%
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV					TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
1	Peningkatan Kondisi Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi	√	√	√	√		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			6.817.732.200	17.976.900.300	17.074.090.890	4.168.516.820

NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV					TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
2	Peningkatan Upaya Penanganan Fungsi dan Infrastruktur Sumber Air	√	√	√	√			Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		2.189.199.200	7.689.334.700	7.609.480.980	2.168.895.420
						Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	28.855.500	15.995.000	21.283.000	59.366.500	
						Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		Normalisasi/Restorasi Sungai	1.132.996.100	2.861.430.400	572.938.500	202.859.000	
						Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun		Pembangunan Tanggul Sungai	784.580.800	4.240.480.300	5.299.710.480	1.373.591.920	
						Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi		Rehabilitasi Tanggul Sungai	193.272.000	396.514.000	1.840.634.000	508.364.000	
						Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	49.495.000	174.915.000	74.915.000	24.915.000	
							Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			4.626.533.000	10.287.595.600	9.464.609.900	1.999.620.400
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	3.097.145.000	8.258.828.000	7.836.624.300	673.541.600	
						Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan		Peningkatan Bendung Irigasi	1.044.000	198.956.000	-	-	
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.344.397.000	1.672.832.600	1.533.036.600	1.311.129.600	
						Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	185.947.000	158.949.000	94.949.000	14.949.000	
Jumlah									6.817.732.200	17.976.900.300	17.074.090.880	4.168.516.820	
SASARAN STRATEGIS						INDIKATOR KINERJA				TARGET			
										TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
3	Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang					Ketaatan terhadap RTRW							33,33%
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV					TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
1	Meningkatkan aturan perencanaan dan pengendalian pengawasan	√	√	√	√		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			207.645.300	6.218.000	5.643.200	5.341.500
								Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		207.645.300	6.218.000	5.643.200	5.341.500

NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV					TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
						Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	207.545.300	6.218.000	5.543.200	5.341.500
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			1.277.124.700	1.053.966.000	152.913.000	133.073.000
								Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		1.155.912.800	937.860.000	37.392.000	35.557.000
						Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota			Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1.155.912.800	937.860.000	37.392.000	35.557.000
								Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		62.231.000	59.719.500	59.427.000	59.427.000
						Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat			Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	62.231.000	59.719.500	59.427.000	59.427.000
								Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		58.980.900	56.386.500	56.094.000	38.089.000
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	58.980.900	56.386.500	56.094.000	38.089.000
Jumlah										1.484.770.000	1.060.184.000	158.556.200	138.414.500
SASARAN STRATEGIS						INDIKATOR KINERJA				TARGET			
4	Terciptanya pelayanan jasa konstruksi yang optimal					Persentase layanan informasi jasa konstruksi				TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
													100%
1	Peningkatan Kinerja Pelayanan Jasa Konstruksi	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV					TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
		√	√	√	√					294.581.500	145.006.100	49.897.500	13.310.400
										146.608.700	117.182.100	30.646.500	10.596.000
										144.860.400	23.045.000	29.395.500	10.187.100
										1.748.300	94.137.100	1.251.000	408.900
										147.972.800	27.824.000	19.051.000	2.714.400
						Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	50.978.000	26.678.000	18.872.500	2.714.400

NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV					TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
						Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	207.645.300	6.218.000	5.843.200	5.341.500
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			1.277.124.700	1.053.966.000	152.913.000	133.073.000
								Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTU) Kabupaten/Kota		1.155.912.800	937.860.000	37.392.000	35.557.000
						Jumlah Dokumen Kebijakan Penda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota			Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1.155.912.800	937.860.000	37.392.000	35.557.000
								Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		62.231.000	59.719.500	58.427.000	58.427.000
						Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat			Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	62.231.000	59.719.500	58.427.000	58.427.000
								Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		58.980.900	56.386.500	56.094.000	38.089.000
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	58.980.900	56.386.500	56.094.000	38.089.000
						Jumlah				1.484.770.000	1.060.184.000	158.556.200	138.414.500
SASARAN STRATEGIS						INDIKATOR KINERJA				TARGET			
4	Terciptanya pelayanan jasa konstruksi yang optimal					Persentase layanan informasi jasa konstruksi				TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
													100%
1	Peningkatan Kinerja Pelayanan Jasa Konstruksi	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Peningkatan dan peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV					TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
		✓	✓	✓	✓					294.581.500	145.006.100	49.897.500	13.310.400
										146.608.700	117.182.100	30.646.500	10.596.000
										144.860.400	23.045.000	29.395.500	10.187.100
										1.748.300	94.137.100	1.251.000	408.900
										147.972.800	27.824.000	19.051.000	2.714.400
						Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	50.978.000	26.078.000	18.872.500	2.714.400

NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV					TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
						Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk			Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	98.994.800	1.746.000	178.500	-
Jumlah										294.581.500	145.006.100	49.697.500	13.310.400
SASARAN STRATEGIS						INDIKATOR KINERJA				TARGET			
5 Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan						Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD				TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
										75 Poin			
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV					TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
1	Meningkatkan dan Mengoptimalkan kemampuan Sumber Daya Manusia Yang ada	√	√	√	√		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13.979.190.050	1.128.763.300	13.420.526.810	576.918.100
								Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		42.280.100	26.550.000	20.851.200	20.218.800
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.694.100	7.383.000	8.014.200	7.383.000
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.596.000	13.167.000	12.837.000	12.835.800
								Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12.745.273.550	12.640.800	12.740.273.750	12.640.800
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.730.307.750	-	12.730.307.750	-
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.800	-	-	-
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.996.000	12.640.800	9.996.000	12.640.800
								Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
								Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		211.133.000	186.788.100	100.883.300	103.059.400
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.695.500	2.492.000	2.665.000	2.145.800
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.433.800	2.311.400	2.261.400	2.663.400
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.934.500	19.929.500	19.515.500	20.620.400

NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV					TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.940.000	23.940.000	23.940.000	23.940.000
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			Penyediaan Bahan/Material	54.546.400	38.054.100	30.354.400	25.205.600
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			Fasilitas Kunjungan Tamu	1.200.000	1.300.000	1.200.000	1.300.000
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.232.100	88.795.100	7.800.000	13.455.000
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.150.700	9.966.000	13.146.000	13.729.000
								Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		214.336.700	179.463.100	111.666.160	14.250.000
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	214.336.700	179.463.100	111.666.160	14.250.000
								Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		706.186.700	669.321.300	386.852.400	368.748.100
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.966.500	58.966.500	58.966.500	58.384.100
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.250.000	12.925.000		
						Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat	252.722.300	225.238.600	112.594.900	76.921.000
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.108.900	19.932.000	19.932.000	19.932.000
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.870.000	15.180.000	15.870.000	15.870.000
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	225.629.000	318.779.000	163.629.000	178.782.000
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.640.000	18.300.000	15.860.000	15.860.000
						Jumlah				13.979.190.850	1.128.763.300	13.420.526.810	576.918.100

NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV					TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
								Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		3.301.509.100	5.193.660.800	301.537.400	286.429.800
						Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaik			Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.500.234.200	4.916.376.000	29.352.000	27.312.000
						Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota			Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	20.616.800	20.392.800	19.626.600	14.211.800
						Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	459.860.000	9.860.000	4.907.300	220.500
						Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	19.483.000	19.483.000	20.183.000	15.699.000
						Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	301.316.100	227.549.000	227.468.500	228.986.500
Jumlah										4.296.716.200	9.926.717.457	13.208.363.285	349.490.000
Jumlah										57.185.394.225	100.658.210.062	106.865.336.920	19.070.730.595
Total										283.779.671.862			

Tahun, 02 Januari 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cirebon
WAN RIZKI
NIP. 19650223 199303 1 004

RENCANA AKSI PERUBAHAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				INDIKATOR KINERJA				TARGET											
SASARAN STRATEGIS						INDIKATOR KINERJA				TARGET															
1 Meningkatkan Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten						Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mentap)				TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV			
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK. II				TK. III				TK. IV							
1						TK. I				TK															

NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV					TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
2	Peningkatan Upaya Penanganan Fungsi dan Infrastruktur Sumber Air	√	√	√	√			Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		2.169.199.200	7.693.234.780	15.509.480.980	5.816.147.120
						Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	28.855.500	15.965.000	21.283.000	59.366.500
						Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi			Normalisasi/Restorasi Sungai	1.132.996.100	2.862.697.900	8.472.938.500	507.525.200
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi			Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	-	-	-	200.000.000
						Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun			Pembangunan Tanggul Sungai	784.569.600	4.241.845.300	5.299.710.480	3.122.226.320
						Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi			Rehabilitasi Tanggul Sungai	163.272.000	397.294.000	1.649.634.000	1.507.584.000
						Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Damu dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	49.495.000	175.402.500	74.915.800	19.444.500
								Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		4.629.533.000	10.303.535.500	9.465.159.900	4.549.583.400
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	3.097.145.000	8.262.123.000	7.838.174.300	2.486.179.600
						Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan			Peningkatan Bendung Irigasi	1.044.000	198.956.000	-	-
						Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi			Rehabilitasi Bendung Irigasi	-	-	-	280.000.000
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Diperbaiki dan Dipelihara			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.344.397.000	1.685.215.100	1.633.036.600	1.748.747.300
						Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	185.947.000	157.241.500	94.949.000	114.655.500
Jumlah									8.817.732.200	17.996.770.300	24.975.840.980	10.365.730.520	

SASARAN STRATEGIS					INDIKATOR KINERJA				TARGET				
									TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV	
3	Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang				Ketaatan terhadap RTRW							33,33%	
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV					TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
1	Meningkatkan situasi perencanaan dan pengendalian penggunaan	✓	✓	✓	✓		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			207.645.200	6.315.500	5.643.200	5.244.000
								Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		207.645.300	6.315.800	5.643.200	5.244.000
						Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Dibuat di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		207.645.300	6.315.500	5.643.200	5.244.000
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			1.277.124.700	1.055.036.500	152.913.000	132.060.500
								Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTU) Kabupaten/Kota		1.155.912.800	938.250.000	37.392.000	35.167.000
						Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		1.155.912.800	938.250.000	37.392.000	35.167.000
								Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		62.231.900	60.109.500	59.427.900	59.037.000
						Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang		62.231.000	60.109.600	59.427.900	59.037.000
								Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		58.980.900	56.679.000	56.094.000	37.796.500
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		58.980.900	56.679.000	56.094.000	37.796.500	
					Jumlah				1.484.778.000	1.081.354.000	158.958.200	137.244.500	

SASARAN STRATEGIS					INDIKATOR KINERJA				TARGET				
									TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV	
4	Terciptanya pelayanan jasa konstruksi yang optimal				Persentase layanan informasi jasa konstruksi							100%	
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV					TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
1	Peningkatan Kinerja Pelayanan Jasa Konstruksi	✓	✓	✓	✓		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			294.561.500	145.201.100	49.697.500	13.115.400
								Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		146.608.700	117.377.100	39.646.500	10.401.000

NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV					TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
						Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	144.860.400	23.240.000	29.395.500	9.992.100
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dibina			Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	1.748.300	64.137.100	1.251.000	408.900
								Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		147.972.800	27.824.000	19.851.000	2.714.400
						Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	90.978.000	26.078.000	18.872.500	2.714.400
						Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk			Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	96.994.800	1.748.000	178.500	-
Jumlah										294.581.500	145.201.100	49.897.500	13.115.400

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA				TARGET			
5 Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan		Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD				TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV				
1	Meningkatkan dan Mengoptimalkan kemampuan Sumber Daya Manusia Yang ada	✓	✓	✓	✓		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
								Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
								Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV					TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.966.000	12.635.800	9.966.000	12.445.600
								Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
								Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		211.133.000	186.983.100	100.883.200	126.541.600
						Jumlah Paket/Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.695.500	2.492.000	2.665.000	2.145.800
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.650.000
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.433.800	2.311.400	2.261.400	2.563.400
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.534.500	19.929.500	19.515.500	20.620.400
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.940.000	23.940.000	23.940.000	23.940.000
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			Penyediaan Bahan/Material	54.546.400	36.054.100	30.364.400	26.205.600
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Temu			Fasilitas Kunjungan Temu	1.200.000	1.300.000	1.200.000	1.300.000
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.232.100	88.795.100	7.800.000	35.482.200
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Aneka Dinamis pada SKPD			Penatausahaan Aneka Dinamis pada SKPD	13.160.700	10.161.000	13.146.000	13.534.000
								Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang		208.250.000	177.970.000	108.416.160	31.727.960
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	208.250.000	177.970.000	108.416.160	31.727.960
								Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah		708.186.700	673.708.800	322.178.100	499.062.540
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.966.500	58.966.500	3.590.200	48.600.000
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.250.000	12.925.000		

NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV					TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
						Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	252.722.300	226.603.800	112.594.900	75.556.000
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.108.900	20.322.900	19.932.000	19.542.000
						Jumlah Asel Tetap Lainnya yang Dipelihara			Pemeliharaan Asel Tetap Lainnya	15.870.000	15.180.000	15.870.000	15.870.000
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	225.629.000	321.411.500	154.329.000	331.734.540
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.640.900	18.300.000	15.860.000	15.880.000
Jumlah										13.938.603.150	13.645.973.150	622.292.760	2.516.708.200

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA						TARGET			
								TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
6	Meningkatnya Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung	Prosentase penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung									84,81%

NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV					TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
1	Meningkatkan Layanan penyediaan Infrastruktur Penyediaan Air Bersih, Sanitasi, persampahan, dan Bangunan Gedung	√	√	√	√		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			632.714.600	4.372.242.657	16.954.369.885	140.386.700
2	Peningkatan Data Base	√	√	√	√			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		632.714.600	4.372.242.657	16.954.369.885	140.386.700
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	91.978.400	5.281.900	7.702.200	104.885.500
						Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	522.929.500	544.930.500	1.098.861.100	12.974.900
						Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			Pembiayaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	13.904.600	42.893.000	10.933.000	8.966.000
						Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.502.700	3.779.137.257	15.846.873.585	12.550.300
							PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			-	-	-	200.000.000
								Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	200.000.000

NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV					TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
						Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun			Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				269.000.000
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			352.492.500	3.146.819.000	4.860.471.000	3.326.913.500
								Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		352.492.500	3.146.819.000	4.860.471.000	3.326.913.500
						Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan			Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	253.521.000	3.131.402.900	4.839.972.900	3.212.257.000
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	108.871.500	15.417.000	20.499.000	114.868.500
							PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			3.301.509.100	5.194.148.300	301.537.400	1.198.442.300
								Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		3.301.509.100	5.194.148.300	301.537.400	1.198.442.300
						Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan			Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.500.234.200	4.916.571.000	29.352.000	639.617.000
						Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota			Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	20.516.800	20.392.800	19.826.500	14.211.800
						Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	459.960.000	9.860.000	4.907.300	300.220.500
						Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	19.483.000	19.483.000	20.183.000	15.699.000

NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV					TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
						Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	301.315.100	227.841.500	227.468.500	228.694.000
Jumlah										4.296.716.200	12.713.208.957	22.126.378.285	4.865.742.500
Jumlah										57.144.807.325	122.643.644.412	104.963.825.870	39.347.466.895
Total										323.799.744.502			

Tahun, 01 Oktober 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
Kabupaten Cirebon



Dr. IRWAN RIZKI
NIP. 19660223 199303 1 004

REALISASI RENCANA AKSI

REALISASI TERHADAP RENCANA AKSI CAPAIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2024

SASARAN STRATEGIS					INDIKATOR KINERJA					TK. I		TK. II		TK. III		TK. IV	
1 Meningkatkan Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten					Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Marbas)					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
JADWAL PELAKSANAAN					OUTPUT / KELUARAN					PAGU ANGGARAN (Rp.)							
NO AKSI / STRATEGI					PROGRAM					Target		Target		Target		Target	
TK. I TK. II TK. III TK. IV					KEGIATAN					Target		Target		Target		Target	
SUB KEGIATAN					SUB KEGIATAN					Target		Target		Target		Target	
1					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					1.323.826.360	33.163.660	3.131.172.260	3.676.986.960	3.631.958.220	802.519.270	1.822.284.260	4.243.324.770
Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan jalan Kabupaten dan Pembangunan Jalan Baru					Kegiatan Perencanaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sempadan Daerah Kabupaten/Kota					1.323.826.360	33.163.660	3.131.172.260	3.676.986.960	3.631.958.220	802.519.270	1.822.284.260	4.243.324.770
					Jumlah Sistem Drainase Perencanaan yang Ditentukan					1.323.826.360	33.163.660	3.131.172.260	3.676.986.960	3.631.958.220	802.519.270	1.822.284.260	4.243.324.770
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Drainase Perencanaan yang disusun					1.323.826.360	33.163.660	3.131.172.260	3.676.986.960	3.631.958.220	802.519.270	1.822.284.260	4.243.324.770
					PROGRAM PENYELANGGARAN JALAN					28.588.577.895	3.280.918.110	73.949.963.665	10.211.717.510	53.086.382.028	51.171.281.440	19.626.631.525	107.386.341.258
					Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					28.588.577.895	3.280.918.110	73.949.963.665	10.211.717.510	53.086.382.028	51.171.281.440	19.626.631.525	107.386.341.258
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Ditentukan					53.920.000	37.851.950	295.335.000	108.641.860	50.370.000	206.803.880	248.855.000	238.608.880
					Jumlah Jembatan yang Ditentukan					624.900.000	1.753.603.000	829.856.000	1.881.600.000	2.440.137.400	1.125.931.600	1.125.931.600	1.125.931.600
					Perbaikan Jalan yang Direkonstruksi					22.195.140.905	80.557.290	42.320.780.265	6.796.749.610	41.877.406.025	41.086.466.870	13.675.781.525	82.455.206.215
					Perbaikan Jalan yang Diperbaiki Secara Berkala					4.535.208.860	15.023.480	10.531.114.840	145.257.000	6.732.482.000	4.844.132.850	6.673.642.800	21.773.561.580
					Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi					58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000
					Perbaikan Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya					22.264.000	18.525.980	265.965.000	20.519.900	20.583.000	19.870.440	19.542.800	263.560.440
					Perbaikan Jalan yang Diperbaiki Secara Rutin					1.554.123.250	3.124.567.400	8.644.250.750	3.577.553.000	134.851.000	2.562.860.800	108.831.800	1.048.805.200
Jumlah										30.312.404.275	3.314.106.760	77.081.135.505	13.886.706.460	58.731.260.345	51.974.160.710	21.448.925.775	111.841.688.038

SASARAN STRATEGIS					INDIKATOR KINERJA					TK. I		TK. II		TK. III		TK. IV	
2 Meningkatkan ketersediaan air melalui infrastruktur SDA					Meningkatnya persentase Intansitas Tanam					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
JADWAL PELAKSANAAN					OUTPUT / KELUARAN					PAGU ANGGARAN (Rp.)							
NO AKSI / STRATEGI					PROGRAM					Target		Target		Target		Target	
TK. I TK. II TK. III TK. IV					KEGIATAN					Target		Target		Target		Target	
SUB KEGIATAN					SUB KEGIATAN					Target		Target		Target		Target	
1					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					6.817.732.200	1.444.819.990	17.996.770.300	4.882.756.420	24.975.640.950	15.377.067.600	10.365.720.520	36.571.791.870
Meningkatkan ketersediaan air melalui infrastruktur SDA					Kegiatan Pengelolaan SDA dan Rancangan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					2.189.199.200	585.483.230	7.693.234.700	3.719.751.670	15.095.480.980	6.620.878.150	5.816.147.120	19.529.715.000
2					Jumlah Lembaga Pengelola SDA Kewenangan Provinsi yang Ditentukan					28.555.500	15.995.080	25.380.900	21.283.000	24.940.000	59.366.590	4.250.000	4.250.000
Meningkatkan upaya penanganan fungsi dan infrastruktur Sumber Air					Normalisasi/Restorasi Sungai					1.132.995.100	457.430.810	2.562.597.300	642.124.950	8.472.935.900	756.500.330	507.525.200	12.807.563.780
					Rehabilitasi Embung dan Penampang Air Lainnya yang Direhabilitasi					754.550.500	72.312.150	4.241.841.300	2.487.411.500	5.259.710.480	4.730.565.360	3.122.296.890	5.875.237.400

NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)							
		TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
						Parang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi			Rehabilitasi Tanggul Sungai	183.272.000	37.851.960	397.294.000	479.538.800	1.940.634.000	1.268.580.800	1.907.584.000	2.477.864.830
						Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Damai, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	49.495.000	18.828.480	175.402.500	78.295.420	74.915.000	40.810.550	19.444.500	173.477.550
								Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 Suku Daerah Kabupaten/Kota		4.628.533.000	858.336.760	10.303.535.800	1.183.084.750	9.488.159.900	8.756.179.359	4.549.583.400	17.942.082.870
						Parang Jamban Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	3.097.145.000	14.064.240	8.262.123.000	10.821.200	7.835.174.300	7.204.849.619	2.485.179.600	13.870.872.820
						Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan			Peningkatan Bendung Irigasi	1.044.000	-	198.956.000	-	-	500.000	-	197.485.000
						Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi			Rehabilitasi Bendung Irigasi	-	-	-	-	-	-	200.000.000	191.145.000
						Parang Jamban Irigasi Permukaan yang Diperbaiki dan Dipelihara			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.344.387.000	830.104.910	1.885.216.100	901.063.350	1.531.036.600	1.380.020.880	1.748.747.300	2.658.179.520
						Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	185.947.800	14.267.610	157.241.500	251.120.200	94.540.000	154.799.480	114.656.500	114.389.330
Jumlah										6.817.732.200	1.444.815.990	97.996.779.300	4.882.796.420	24.975.649.880	15.377.067.589	10.365.738.830	36.571.797.870

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA				PAGU ANGGARAN (Rp.)							
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
		TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV					Target	Realisasi	Target	Realisasi
3	Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemasangan dan Pengendalian Tata ruang					Ketatan terhadap RTRW							
1	Meningkatkan standar perencanaan dan pengendalian pembangunan	✓	✓	✓	✓		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			207.645.300	4.348.240	6.315.500	206.603.030
								Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		207.645.300	4.348.240	6.315.500	206.603.030
						Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				207.645.300	4.348.240	6.315.500	206.603.030
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			1.277.124.700	84.100.000	1.055.036.500	182.549.720
								Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTK) Kabupaten/Kota		1.156.912.800	25.100.000	938.250.000	46.653.180
						Jumlah Dokumen Kebijakan PendaPerkasi selain RTRW Kabupaten/Kota				1.155.912.800	25.100.000	938.250.000	46.653.180
								Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		1.155.912.800	25.100.000	938.250.000	46.653.180
								Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		62.231.000	31.625.000	60.109.500	83.253.380
						Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				62.231.000	31.625.000	60.109.500	83.253.380

NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)							
		TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
								Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemantapan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		58.980.900	26.375.200	56.679.000	53.643.160	56.094.000	64.217.830	37.796.500	62.837.230
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	58.980.900	26.375.000	56.679.000	53.643.160	56.094.000	64.217.830	37.796.500	62.837.230
						Jumlah				1.484.776.000	98.448.249	1.661.354.000	390.150.754	158.556.200	539.647.620	137.244.900	1.890.162.820

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA						PAGU ANGGARAN (Rp.)							
4 Terciptanya pelayanan jasa konstruksi yang optimal		Persentase layanan informasi jasa konstruksi						TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV				
								Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
								Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
NO	AKSI / STRATEGI	TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV	OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Peningkatan Kinerja Pelayanan Jasa Konstruksi	✓	✓	✓	✓		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			294.581.500	27.575.000	145.201.100	239.482.940	49.897.900	123.854.020
								Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		145.638.700	9.300.000	117.377.100	145.479.040	30.546.500	83.991.520
						Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi		144.800.400	9.300.000	23.240.000	138.163.640	28.385.500	18.985.220
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknis atau Analis yang Ditata		Latihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknis atau Analis		1.748.300	-	94.137.100	8.316.000	1.251.800	83.088.300
								Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemertan Jasa Konstruksi		147.972.800	18.275.000	27.824.000	83.063.360	16.851.300	29.062.500
						Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawal dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota		60.978.000	2.825.000	26.978.000	41.215.000	18.872.500	29.562.500
						Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Ditata Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemertan Produk		Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemertan Produk Jasa Konstruksi		96.994.800	16.250.000	1.745.000	51.788.300	178.500	-
						Jumlah				294.581.500	27.575.000	145.201.100	239.482.940	49.897.900	123.854.020

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA						PAGU ANGGARAN (Rp.)							
5 Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan		Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD						TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV				
								Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
								Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
NO	AKSI / STRATEGI	TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV	OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatkan dan Mengoptimalkan kemampuan Sumber Daya Manusia Yang ada	✓	✓	✓	✓		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13.538.603.150	6.917.927.819	13.545.973.150	8.559.363.816	622.292.700	6.557.601.208
								Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		40.240.100	32.213.710	20.512.500	26.811.650	20.851.200	19.711.530
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		26.674.100	19.799.470	7.480.500	13.371.880	8.014.200	7.436.310
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Mita Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mita Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mita Realisasi Kinerja SKPD		13.566.000	12.414.240	13.032.000	13.439.700	12.837.900	12.335.220
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12.712.783.350	6.355.747.235	12.525.796.750	7.362.144.467	9.966.080	5.671.199.946
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12.697.827.560	6.351.333.196	12.513.962.950	7.371.722.457	5.506.658.226	1.767.004.000
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4.999.800	4.999.800	-	-	-	-

NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAUANGSARAN (Rp.)							
		TK I	TK II	TK III	TK IV					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.866.000	9.414.240	12.835.800	10.422.000	9.966.000	11.541.720	12.445.800	12.092.520
								Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		60.000.000	54.000.000	60.000.000	-	60.000.000	54.000.000	60.000.000	108.000.000
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60.000.000	54.000.000	60.000.000	-	60.000.000	54.000.000	60.000.000	108.000.000
								Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		211.133.000	31.341.840	196.983.100	263.086.377	100.883.300	196.641.720	126.541.600	142.275.050
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.595.500	839.500	2.492.000	4.348.000	2.666.000	2.666.000	2.145.800	2.145.800
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	1.650.000	1.550.000
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.431.800	953.800	2.311.400	5.791.400	2.261.400	2.261.400	2.663.400	2.663.400
						Jumlah Paket Barang Bekalan dan Penggantian yang Disediakan			Penyediaan Barang Bekalan dan Penggantian	19.934.500	871.800	19.929.500	30.597.200	19.515.500	15.368.000	20.620.400	33.007.630
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.940.000	15.960.000	23.940.000	23.940.000	23.940.000	31.920.000	23.940.000	23.940.000
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			Penyediaan Bahan/Material	54.546.400	-	38.054.100	54.546.400	30.354.400	89.408.580	25.205.800	25.205.800
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			Fasilitas Kunjungan Tamu	1.200.000	400.000	1.300.000	2.100.000	1.200.000	1.280.000	1.300.000	1.300.000
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.232.100	2.805.000	88.795.100	118.124.677	7.800.000	66.082.600	35.482.200	35.475.500
						Jumlah Dokumen Perakusahan Arsip Dinamis pada SKPD			Perakusahan Arsip Dinamis pada SKPD	13.190.700	5.511.740	10.151.000	13.538.700	13.146.000	9.935.220	12.534.000	16.862.520
								Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		206.250.000	110.153.753	177.970.000	134.288.832	108.415.160	161.128.212	31.727.980	120.061.470
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	208.250.000	110.153.753	177.970.000	134.288.832	108.415.160	161.128.212	31.727.980	120.061.470
								Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		706.156.700	324.541.280	673.708.800	773.082.800	322.178.100	462.859.800	490.062.540	608.761.830
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pengadaannya			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.966.500	-	58.966.500	27.000.000	3.580.200	94.500.000	40.500.000	40.500.000
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perorangan Dinas			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.250.000	122.500	12.925.000	-	-	12.966.500	-	7.682.500
						Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perorangan Dinas			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perorangan Alat Besar	252.722.300	110.425.150	226.503.800	253.888.700	112.584.900	146.452.740	75.555.000	83.279.540
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.108.900	18.925.580	20.322.000	114.048.300	15.832.900	19.577.940	19.542.000	19.577.940
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.870.000	-	15.180.000	25.630.000	15.870.000	21.380.000	15.870.000	15.870.000
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	225.629.000	135.067.620	321.411.500	314.985.600	154.329.000	136.383.620	331.734.540	426.021.750
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.640.000	-	18.300.000	26.840.000	15.860.000	21.560.000	15.860.000	15.860.000
Jumlah										13.938.863.150	8.917.997.619	13.845.973.150	8.989.393.816	622.292.760	6.897.801.208	2.816.768.200	7.622.467.880

SASARAN STRATEGIS					INDIKATOR KINERJA					TK I		TK II		TK III		TK IV	
										Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
6 Meningkatkan Kualitas penyediaan system air minum, Persampahan, Air Limbah dan Bangunan Gedung					Prosentase penyediaan system air minum, Persampahan, Air Limbah dan Bangunan Gedung											64,91%	47,31%
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAJUAN ANGGARAN (Rp.)							
		TK I	TK II	TK III	TK IV					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatkan Layanan penyediaan Infrastruktur Penyediaan Air Bersih, Sanitasi, persampahan, dan Bangunan Gedung	√	√	√	√		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			532.714.600	26.389.350	4.372.242.657	54.102.200	16.994.369.885	8.221.750.750	140.386.700	13.111.411.650
2	Peningkatan Data Base	√	√	√	√			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		532.714.600	26.389.350	4.372.242.657	54.102.200	16.994.369.885	8.221.750.750	140.386.700	13.111.411.650
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		91.978.400	4.658.370	5.281.900	6.880.280	7.782.280	91.969.330	104.886.500	103.484.310
						Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		522.829.500	12.414.240	544.930.500	28.489.960	1.098.061.100	1.153.234.390	12.574.900	981.305.120
						Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa		13.904.000	9.318.740	42.993.000	18.731.960	10.933.000	19.323.460	9.986.000	36.111.720
						Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		3.902.700	-	3.779.137.257	-	15.946.873.585	6.966.199.600	12.980.300	11.950.510.500
						PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				-	-	-	-	-	-	200.000.000	198.605.000
							Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-	-	-	-	200.000.000	198.605.000
						Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		-	-	-	-	-	-	200.000.000	198.605.000
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				382.462.500	26.959.350	3.146.819.000	2.752.047.900	4.860.471.000	5.208.126.400	3.326.913.500	3.661.280.900
							Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			382.462.500	26.959.350	3.146.819.000	2.752.047.900	4.860.471.000	5.208.126.400	3.326.913.500	3.661.280.900
						Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		253.521.000	17.545.110	3.131.402.000	2.737.605.440	4.838.972.000	5.194.004.440	3.212.257.000	3.461.581.330
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		106.971.500	9.414.240	15.417.000	14.442.460	20.499.000	14.121.980	114.656.500	199.599.620
						PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				3.301.509.100	45.134.960	5.194.148.300	1.395.158.345	301.537.400	2.445.451.940	1.198.442.300	5.675.768.140
							Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laki Fungsi Bangunan Gedung			3.301.509.100	45.134.960	5.194.148.300	1.395.158.345	301.537.400	2.445.451.940	1.198.442.300	5.675.768.140
						Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang diubah		Pengubahan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		2.500.234.200	11.889.940	4.916.571.000	583.319.580	25.362.000	1.993.886.310	638.617.000	5.116.743.110

NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RANGKAIAN ANGGARAN (Rp.)							
		TK I	TK II	TK III	TK IV					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
						Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kependidikan Strategis Kabupaten/Kota			Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kependidikan Strategis Kabupaten/Kota	20.615.800	5.633.800	20.362.800	22.750.900	19.826.600	6.197.400	14.211.800	20.334.800
						Jumlah Dokumen Pembangunan Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kependidikan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kependidikan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	450.850.000	4.430.000	9.860.000	358.050.025	4.907.300	107.813.300	300.220.500	293.966.500
						Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	16.483.000	5.200.000	16.483.000	16.975.900	20.183.000	21.300.000	15.099.000	11.541.000
						Jumlah Penyerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Lahan Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKG), Rencana Teknis Pembangunan Bangunan Gedung (RTBG), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendaftaran Bangunan Gedung melalui SBRBG			Penyelenggaraan Penyerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Lahan Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKG), Rencana Teknis Pembangunan Bangunan Gedung (RTBG), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendaftaran Bangunan Gedung melalui SBRBG	391.316.100	18.001.220	227.841.500	414.062.940	227.488.500	316.694.000	228.694.000	233.182.500
Jumlah										4.296.716.200	99.483.860	12.713.280.587	4.201.308.445	22.126.378.285	15.875.360.690	4.865.743.900	22.647.366.740
Jumlah										57.144.807.325	11.891.434.429	122.643.644.412	32.171.800.831	104.663.825.870	90.467.420.167	39.347.486.895	180.278.914.868
Jumlah Total Target										323.789.744.502							
Jumlah Total Realisasi										314.809.580.265							



Lampiran 3 EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT
Jl. Sunan Giri No. 2 Telp/Fax. (0231) 321643
Website : inspektorat.cirebonkab.go.id email inspektorat@cirebonkab.go.id
SUMBER

CATATAN HASIL REVIU
ATAS EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
TAHUN 2023 PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.11.1/575-Sekt tanggal 15 Februari 2024 untuk melaksanakan Evaluasi AKIP Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut :

- A. Waktu Pelaksanaan Evaluasi:
Evaluasi dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kerja mulai dari tanggal 4 s/d 26 Maret 2024.
- B. Penilaian
Dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, diperoleh hasil, sbb :
- Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Nilai Angka Evaluasi AKIP : 74,50
Kategori Predikat : BB (Sangat Baik)
Dengan Catatan sebagai berikut :

A.	PERENCANAAN KINERJA
1.	-
2.	-
3.	-
B.	PENGUKURAN KINERJA
4.	-
5.	-
6.	-
C.	PELAPORAN KINERJA
7.	Laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional
8.	-
9.	-
D.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
10.	-
11.	-
12.	-

C. Rekomendasi

Dari hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 sebagaimana tercantum di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon, agar :

A.	PERENCANAAN KINERJA
1.	-
2.	-
3.	-
B.	PENGUKURAN KINERJA
4.	-
5.	-
6.	-
C.	PELAPORAN KINERJA
7.	Melengkapi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dengan menginfokan perbandingan dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional
8.	-
9.	-
D.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
10.	-
11.	-
12.	-

E. Hal-hal yang perlu diperhatikan :

- Tindaklanjuti hasil evaluasi Akip Tahun 2022 oleh APIP telah ditindaklanjuti seluruhnya.

Demikian Catatan Hasil Reviu (CHR) atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon, kiranya menjadi maklum dan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dimaksud.

Sumber, 26 Maret 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
Kabupaten Cirebon



Ir. IWAN RIZKI
NIP. 19660925 199303 1 004

Wakil Penanggung Jawab

EUIS SITI SONDARI, S.Sos
NIP. 19690206 198903 2 005

TINDAKLANJUT HASIL REVIU LAKIP TAHUN 2023

BERITA ACARA TINDAKLANJUT HASIL REVIU LAKIP
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pada hari ini Kamis tanggal 18-07-2024, telah dilaksanakan tindaklanjut hasil reviu LAKIP tahun 2023, dengan hasil sebagai berikut :

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Jumlah Temuan : 1

NO	REKOMENDASI TEMUAN	TINDAKLANJUT OPD	PENYELESAIAN		DOKUMEN PENDUKUNG	
			SELESAI	BELUM SELESAI	ADA	TIDAK ADA
	PERENCANAN KINERJA					
	-					
	PENGUKURAN KINERJA					
	-					
	PELAPORAN KINERJA					
1	Melengkapi Laporan Akuntabilitas Kinerja Istansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dengan menginfokan perbandingan dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional	No. 800.15.1/1558/sekre tgl 09/06/2024 Tindak lanjut Hasil Reviu atas Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja	selesai		Dokumen terlampir	
	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL					
	-					

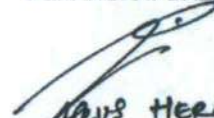
a.n. TIM TINDAKLANJUT



Arion C. Pramadi
NIP. 1979041920011007

Sumber, 18-07-2024

PERANGKAT DAERAH



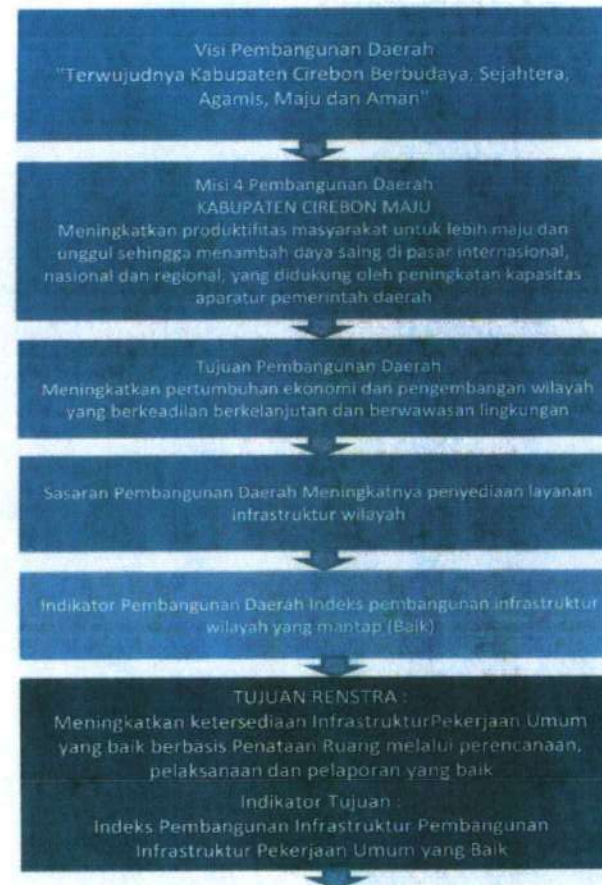
Dars Hernawan
NIP. 197508132006041003

Catatan:

Bukti Tindakanlanjutan diarsipkan oleh tim tindakanlanjutan dalam bentuk softcopy

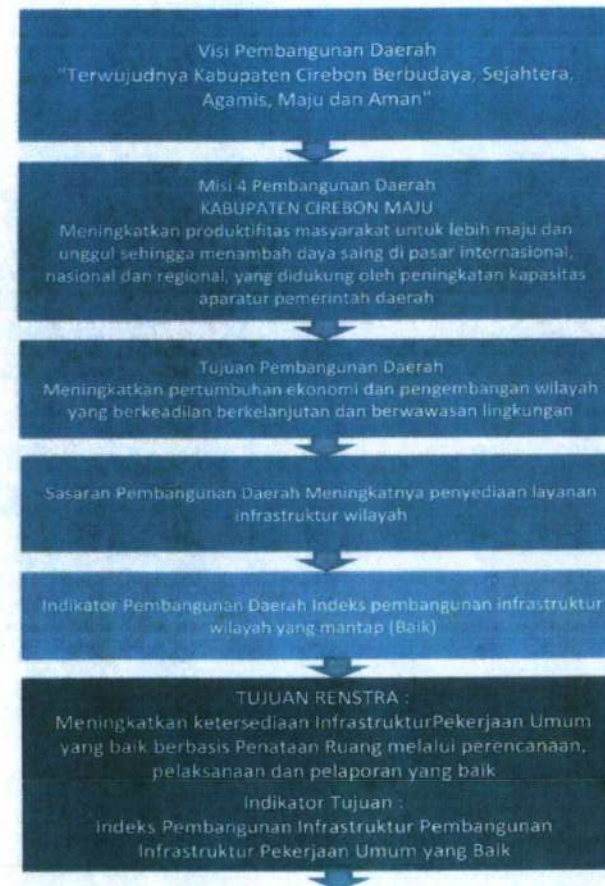
CASE CADING

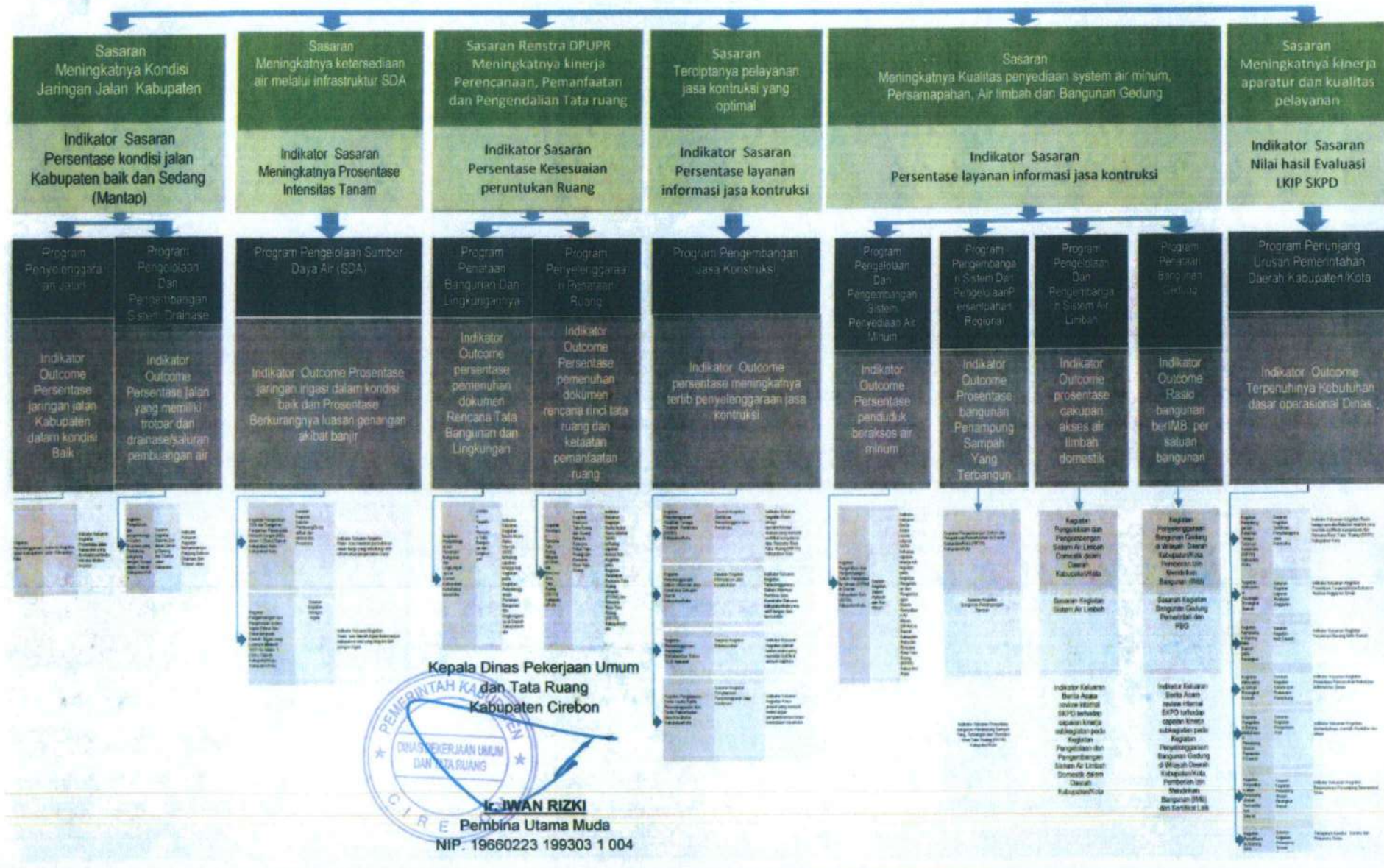
CASE CADING DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG



CASE CADING

CASE CADING DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG





CROSS CUTTING

